

Volume 4 Nomor 1, Juni 2024

Academy of Social Science and Global Citizenship Journal

**Kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dalam
melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang berpusat pada
peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura**

Ambar, Wijianto, Winarno

1-11

Tinjauan ontologis terhadap objek pengetahuan dalam filsafat ilmu

Rika Yohana Sari, Jasrial, Sulastri

12-20

**Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital
Terhadap Efisiensi Administrasi Pendidikan**

Rika Yohana Sari, Ahmad Subandi, Irsyad

21-29

State defence education among the younger generation

Inayah Junika Zahira, Mas Fierna Janvierna Lusie Putri

30-36

**Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk Mencegah
Gelandangan dan Pengemis**

Intan Nur Ainnisa, Syifa Siti Aulia

37-44



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

Kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura

Ambar¹, Wijianto², Winarno³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

* ambaramb45@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 12 Januari 2024

Direvisi: 25 Maret 2024

Disetujui: 2 Mei 2024

Tersedia Daring: 4 Juni 2024

Kata Kunci:

Hasil Belajar Peserta
Kompetensi Pedagogik
Penilaian Proses

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: 1) Menilai kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura. 2) Menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMAN Negeri 1 Kartasura. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data dari informan (guru Pendidikan Pancasila), observasi proses pembelajaran dan penilaian peserta didik, serta dokumen seperti bahan ajar kelas X dan XI. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan triangulasi data dan teknik. Analisis data mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan pendekatan Miles dan Huberman (1984). Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila memiliki kompetensi pedagogik yang baik namun masih terdapat kekurangan dalam pengembangan instrumen penilaian. Proses penilaian dilaksanakan dengan tahapan perumusan tujuan, pemilihan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengelolaan hasil, dan pelaporan. Faktor penghambat melibatkan kesulitan memahami karakter peserta didik, banyaknya kegiatan ekstrakurikuler peserta didik, dan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penilaian.

ABSTRACT

Keywords:

Pedagogical Competence
Process Assessment
Student Learning
Outcomes

This research has two main objectives: 1) To assess the pedagogical competence of Pancasila Education teachers in implementing student-centered assessment processes and outcomes at SMA Negeri 1 Kartasura. 2) To analyze the inhibiting factors faced by Pancasila Education teachers in carrying out student-centered assessment processes and outcomes at SMA Negeri 1 Kartasura. This qualitative study sources data from informants (Pancasila Education teachers), observations of the teaching and assessment processes, as well as documents such as teaching materials for grades X and XI. Sampling was conducted using purposive sampling techniques, and data collection was carried out through interviews, observations, and documentation. Data validation utilized data and technique triangulation. Data analysis followed the steps of data reduction, data presentation, and conclusion drawing as per the Miles and Huberman (1984) approach. The results indicate that Pancasila Education teachers possess good pedagogical competence, but there are still deficiencies in the development of assessment instruments. The assessment process is carried out through the stages of formulating objectives, selecting instruments, conducting assessments, managing results, and reporting. Inhibiting factors include difficulties in understanding student characteristics, the high number of extracurricular activities, and time constraints in conducting assessments.



How to Cite: AmbarA., WijiantoW., & WinarnoW. (2024). Kompetensi pedagogik Guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.47200/aosagcj.v4i1.2365>

1. Pendahuluan

Profesionalitas, berasal dari "profesi," merujuk pada pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Sebagai profesi, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan tanpa pelatihan khusus (Cece Wijaya: 1994,1). Profesi ini menuntut persyaratan dan kompetensi spesifik, diakui oleh masyarakat dan pemerintah, dengan kode etik yang diwajibkan (Toatubun, Fathul Arifin, & Muhammad Rijal: 2018,15). Prinsip serupa berlaku untuk profesi guru, di mana guru dianggap sebagai individu dengan keahlian khusus untuk mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah (Hasbullah, 2017: 108). Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 Pasal 1 dan 2 menegaskan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama melibatkan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di berbagai tingkat pendidikan (Ika Widyawati, Edy Herianto, Rispawati, 2020: 134). Profesionalitas guru memerlukan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sesuai tingkat pendidikan tertentu (Ika Widyawati, Edy Herianto, Rispawati, 2020: 134). Harapannya, guru harus memiliki profesionalitas keguruan yang memadai untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan memberikan kontribusi positif untuk masa depan negara Indonesia (Susanto, 2020: 56-62). Sistem pendidikan nasional sangat bergantung pada guru sebagai perancang, pelaksana, dan peneliti dalam proses pembelajaran, dengan Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 menetapkan empat kompetensi utama, di mana kompetensi pedagogik dianggap paling esensial (Permendikbud No. 70/2013).

Kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila mencakup kemampuan dalam mengelola pembelajaran, termasuk pemahaman materi ajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik (Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Dalam penilaian proses dan hasil belajar, guru diharapkan membentuk siswa sebagai warga masyarakat yang baik sesuai dengan kurikulum yang menekankan pengembangan kompetensi sikap bersama dengan pengetahuan dan keterampilan (Permendikbud No. 70/2013). Namun, realitas menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, di mana beberapa guru menghadapi kesulitan dalam menilai aspek sikap dan keterampilan peserta didik (Suprananto M.Ed, 2014). Pemahaman guru terhadap penilaian, hasil dari pelatihan atau bimbingan teknis Kurikulum 2013, masih dianggap rendah oleh sebagian besar (Puspendik). Selain itu, penilaian peserta didik seringkali hanya fokus pada aspek kognitif, tanpa memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik (Wahyuni R & Berliani T, 2018).

Penilaian hasil belajar peserta didik dalam Pendidikan Pancasila lebih cenderung menitikberatkan aspek kognitif, dengan aspek keterampilan dan sikap sering diabaikan. Peserta didik juga lebih menghargai penilaian yang berdampak langsung pada nilai akhir, menganggap penilaian terhadap keterampilan kurang signifikan (Delfiyan Widiyanto & Annisa Istiqomah, 2020). Oleh karena itu, tantangan bagi guru Pendidikan Pancasila adalah mengembangkan penilaian yang mencakup semua aspek pembelajaran, mendukung

pengembangan siswa sebagai warga negara aktif dalam masyarakat (Delfiyan Widiyanto & Annisa Istiqomah, 2020). Data Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2019 menunjukkan nilai kompetensi pedagogik di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar sebesar 57,80 dan 56,75, sedangkan Kabupaten Boyolali mencapai 56,31 untuk jenjang PAUD-SMA/SMK. Meskipun melebihi rata-rata UKG tahun 2019 sebesar 50,50, nilai tersebut masih lebih rendah daripada nilai Kota Surakarta yang mencapai 60,16 (Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kemendikbud: 2019).

Penelitian oleh Akhmad Riadi (2017) menunjukkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar peserta didik sering terfokus pada ranah pengetahuan, bahkan belum mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran. Solusi yang diusulkan termasuk peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran, lokakarya, seminar, atau mengundang tutor dari kementerian. Guru juga perlu memperkuat kompetensi pedagogiknya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan membantu mereka berhasil dalam proses belajar (Indri Okta Sari, Junaidi Indrawadi, & Al Rafni: 2019). Kemampuan guru dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik merupakan aspek integral dari kompetensi pedagogik guru. Meilani Fatzuarni (2022) menyoroti bahwa ketidakmampuan guru memiliki kompetensi pedagogik, terutama pengetahuan tentang cara melakukan penilaian dengan benar, dapat merugikan moral guru. Guru yang tidak mampu melakukan penilaian dengan benar dapat menunjukkan perilaku kurang etis, seperti manipulasi nilai, yang berdampak pada rendahnya motivasi peserta didik untuk belajar lebih baik. Penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Fitri Kurnia (2018) dan Adhistami Putri Pradani (2019), menunjukkan bahwa guru sering kali melakukan penilaian secara subjektif dan belum sepenuhnya mengembangkan instrumen penilaian yang baik. Sementara itu, penelitian oleh Septian Jatniko Isfandika & Arif Purnomo (2022) dan Naryo (2022) menunjukkan bahwa guru sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan alat penilaian dan instrumen penilaian sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pedagogik guru Pendidikan Pancasila dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik, khususnya dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Fokus penelitian mencakup identifikasi hambatan yang dihadapi oleh guru Pendidikan Pancasila dalam melakukan penilaian, dengan pra-penelitian awal di SMAN 1 Kartasura menunjukkan bahwa penilaian masih terfokus pada ranah kognitif dan belum sepenuhnya mencakup aspek sikap dan keterampilan. Penilaian ini memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang baik dan diharapkan mencakup tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan nilai sikap kewarganegaraan (Winarno: 2013, 25-27). Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang kemampuan pedagogik guru Pendidikan Pancasila dalam mengimplementasikan penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum, serta memahami hambatan yang dihadapi dalam konteks Kurikulum Merdeka.

2. Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data dari informan (guru Pendidikan Pancasila), observasi proses pembelajaran dan penilaian peserta didik, serta dokumen seperti bahan ajar kelas X dan XI. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan triangulasi data dan teknik. Analisis data mengikuti langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan pendekatan Miles dan Huberman (1984).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kompetensi Guru Pendidikan Pancasila dalam Melaksanakan Penilaian Proses dan Hasil Belajar yang Berfokus pada Peserta Didik di SMA Negeri 1 Kartasura

Penilaian hasil peserta didik mengacu pada standar penilaian kurikulum Merdeka sebagaimana diatur dalam Peraturan Kemendikti Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Langkah-langkah penilaian melibatkan beberapa tahapan:

1) Menetapkan tujuan penilaian.

Guru Pendidikan Pancasila memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Rencana pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka dikenal dengan sebutan Model Ajar. Sehingga dalam merumuskan tujuan penilaian ini sama dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dicantumkan yaitu 10.1 Peserta didik mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Tujuan pembelajaran yang baik menurut Baker (1971) mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Conditioning, Degree). Dalam tujuan pembelajaran 10.1 tersebut belum mengandung unsur ABCD karena tidak mencantumkan degree. Tidak hanya itu berdasarkan hasil wawancara, guru Pendidikan Pancasila sebelum melaksanakan penilaian membuat kisi-kisi penilaian. Hal ini bertujuan mempermudah guru dalam melaksanakan penilaian. Hal tersebut sejalan dengan H. Djaali, Pudji Muljono (2008) bahwa kisi-kisi dibuat untuk menjamin sampel soal yang baik, berarti mencakup semua pokok bahasan secara proporsional. Agar butir-butir tes mencakup seluruh materi, baik pokok bahasan atau sub bahasan secara proporsional maka sebelum menulis butir-butir tes terlebih dahulu guru harus membuat kisi-kisi sebagai pedoman. Kisi-kisi harus mencakup semua aspek kemampuan yang hendak dinilai.

2) Memilih atau mengembangkan instrumen penilaian.

Berdasarkan hasil temuan studi pada saat pembelajaran berlangsung guru Pendidikan Pancasila SMA Negeri 1 Kartasura melakukan pengembangan instrument penilaian pada awal pembelajaran, ini dilihat dari pemberian penilaian diagnostik/pertanyaan pada awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik. Pada saat pembelajaran guru Pendidikan Pancasila memberikan penilaian formatif kepada peserta didik dengan tujuan untuk refleksi terhadap keseluruhan proses pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan pembelajaran dan melakukan revisi apabila diperlukan. Biasanya guru Pendidikan Pancasila menggunakan teknik penilaian tas tulis/lisan. Dan yang terakhir yaitu pada akhir pembelajaran, guru Pendidikan Pancasila melakukan penilaian sumatif untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik selama satu semester. Tetapi guru Pendidikan Pancasila dalam Modul ajar yang dibuat hanya mencantumkan instrument penilaian pada ranah afektif saja. Hal tersebut sejalan dengan Warsiyah, Dkk (2023, Hal. 11-13) bahwa dalam pemilihan dan atau pengembangan instrument penilaian guru mengembangkan instrument penilaian untuk awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan akhir pembelajaran.

3) Melaksanakan penilaian.

Pelaksanaan penilaian dapat dilaksanakan sebelum proses pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung atau diakhir pembelajaran. Janawi (2011) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penilaian dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

a) Menentukan kriteria aspek penilaian pembelajaran

Berdasarkan temuan hasil studi, guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura sebelum memulai pembelajaran selalu memberikan pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal dan karakteristik peserta didik. Anizar dan Sardin (2023)

menjelaskan bahwa prinsip pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar salah satunya yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar peserta didik, dan mencerminkan karakteristik peserta didik. Sehingga dalam melakukan penilaian guru juga merujuk pada prinsip pembelajaran tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Dini Faizah, Padi Utomo, dan M. Arifin (2018): "pertanyaan yang diajukan oleh guru selama proses pembelajaran tidak hanya dapat meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga dapat berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian pendekatan, metode, dan teknik pengajaran di kelas. Selain itu, pertanyaan tersebut dapat membantu menilai kesesuaian materi yang diajarkan dengan situasi, kondisi, tujuan pembelajaran, serta kebutuhan siswa".

- b) Menyusun alat penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran
Dari hasil temua studi menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura menggunakan alat penilaian pada setiap ranah berbeda-beda. Pada ranah kognitif guru Pendidikan Pancasila menggunakan alat ukur berupa tes, baik tes tulis maupun tes lisan. Sedangkan untuk ranah afektif dan psikomotor guru Pendidikan Pancasila menggunakan alat ukur berupa observasi. Alat ukur yang digunakan dalam penilaian proses dan hasil belajar peserta didik berbeda-beda, tergantung pada informasi apa yang akan dikumpulkan. Dalam menyusun alat ukur untuk penilaian juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Qomari (2008, Hal. 3) yang menjelaskan bahwa "tes adalah salah satu metode penilaian yang efektif untuk mengukur pencapaian kognitif, terutama melalui tes tertulis". Namun guru Pendidikan Pancasila dalam menyusun alat ukur dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik pada ranah psikomotor tidak tepat apabila menggunakan observasi. Karena dalam ranah psikomotor yang diukur yaitu kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan materi atau pengetahuan yang sudah didapatkan pada saat proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Majid (2017, Hal. 78) yang menjelaskan bahwa "guru dalam melaksanakan penilaian pada ranah psikomotorik melalui penilaian kinerja, di mana peserta didik diminta untuk menunjukkan kompetensi melalui berbagai bentuk seperti uji praktik, proyek, dan penilaian portofolio".
- c) Menggunakan jenis penilaian dan teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan
Berdasarkan hasil temuan studi menunjukkan guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura melakukan penilaian formatif dan penilaian sumatif saja, penilaian pada awal pembelajaran atau penilaian diagnostik tidak dilaksanakan. Penilaian diagnostik sangat perlu dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam belajar sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembelajaran oleh guru. Hal ini sesuai dengan Ardiansyah, dkk (2023) dalam Assesmen dalam Kurikulum Merdeka Belajar yang menyebutkan "Penilaian diagnostik merupakan suatu evaluasi yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kemampuan, kelebihan, dan kelemahan siswa. Tujuan dari penilaian ini adalah agar desain pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan dan status individu siswa. Hasil dari penilaian diagnostik dapat berfungsi sebagai dasar atau titik awal bagi pendidik untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar masing-masing siswa".
- d) Mendokumentasikan hasil penilain proses dan hasil belajar peserta didik
Berdasarkan temuan hasil studi guru Pendidikan Pancasila menerapkan prinsip-

prinsip penilaian, yaitu adil, dapat dipercaya dan terbuka. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dimana guru memberikan penjelasan sebelum melaksanakan penilaian, memberikan penjelasan terkait skor tiap soal tes, dan memberikan remedi atau pengayaan terhadap peserta didik yang belum mencapai kriteria kecapaian tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dalam Kurikulum Merdeka pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Berdasarkan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah bahwa "penilaian harus direncanakan dengan adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya (reliable) agar dapat menggambarkan kemajuan belajar secara akurat. Selain itu, penilaian juga diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran. Hasil penilaian yang handal juga menjadi dasar yang kuat untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik".

- e) Mengidentifikasi keberhasilan penilaian proses dan hasil belajar Berdasarkan hasil temuan studi Guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura menyebutkan bahwa dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dalam menentukan keberhasilan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Tetapi guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura masih menggunakan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 70 sebagai patokan keberhasilan penilain hasil belajar peserta didik. Peserta didik dikatakan berhasil dalam penilaian dan belajarnya, apabila dapat mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, Ulfah&Opan Arifud (2021). Hal tersebut sesuai dengan Kahar (2022) bahwa "Dalam Kurikulum Merdeka keberhasilan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lagi digunakan dan berganti menjadi (KKTP)".
- f) Menggunakan hasil penilaian sebagai bahan remedial dan pengayaan
Hasil temuan studi menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila setelah proses penilaian dan hasil belajar peserta didik diketahui, guru Pendidikan Pancasila menggunakan hasil penialain untuk bahan remisial dan pengayaan. Dalam melaksanakan kegiatan remedial untuk peserta didik yang nilai nya belum tuntas dan pengayaan untuk peserta didik yang sudah tuntas. Pemberian remedial ini dilakukan dengan memberikan soal kepada peserta didik untuk dikerjakan ulang, memberikan tugas portofolio, atau dengan merangkum materi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan mutu pembelajaran dilakukan dengan cara melakukan remedial atau pengayaan. Dalam Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (2022: 35) menjelaskan bahwa guru dapat melaksanakan remedial dan pengayaan dengan menggunakan interval untuk nilai tes untuk meningkatkan nilai peserta didik. Anizar dan Sardin (2023) menjelaskan bahwa dalam Kurikulum Merdeka belajar terdapat 3 tahapan dalam penilaian yaitu remedial, pelaporan, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik. Namun remedial yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Pancasila ini tidak sesuai dengan Antonius (2022) bahwa "remedial bukan mengulang tes dengan materi yang sama, tetapi guru memberikan intervensi/tindakan perbaikan pembelajaran pada lingkup materi yang belum dikuasai oleh peserta didik melalui upaya tertentu. Setelah perbaikan pembelajaran dilakukan, guru melakukan tes untuk mengetahui apakah peserta didik telah memenuhi kompetensi dari tujuan pembelajaran yang diremedialkan". Sedangkan pemberian pengayaan dilakukan dengan memberikan tugas untuk membaca dan meringkas bab/materi selanjutnya. Izzati (2015: 57- 58)

berpendapat bahwa pengayaan berfungsi sebagai program upaya membantu peserta didik yang mendapatkan nilai akademik bagus untuk terus memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

4) Mengumpulkan dan mengolah hasil penilaian.

Hasil temuan studi guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 kartasura, berdasarkan wawancara guru Pendidikan Pancasila mengelola hasil penilaian dengan data kuantitatif. Yaitu dengan memberikan nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tes lisan maupun tertulis. Hal ini sejalan dengan Panduan Pembelajaran dan Asesmen (2021) bawa hasil penilaian perlu diolah untuk menjadi capaian dari tujuan pembelajaran peserta didik. Guru dapat menggunakan data kualitatif sebagai hasil penilaian tujuan peserta didik dan dapat juga menggunakan data kuantitatif dan mendiksi secara kualitatif. Pemberian nilai ini berdasarkan pada kriteria capaian pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru Pendidikan Pancasila dalam Modul Ajar

5) Memberikan laporan hasil penilaian

Hasil penilaian dituangkan dalam laporan kemajuan belajar atau dalam bentuk rapor. Laporan hasil belajar peserta didik paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik.

Lebih lanjut untuk memperkuat data sebelumnya, peneliti juga melakukan penilaian kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian berdasarkan Permendiknas no 16 tahun 2007, Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penilaian kompetensi pedagogik kedua narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa narasumber pertama memiliki skor sebesar 78 dengan predikat cukup, ini lebih rendah jika dibandingkan dengan narasumber kedua. Narasumber kedua memperoleh skor 82 dengan predikat baik. Walaupun terdapat perbedaan dalam skor yang diperoleh dan skor perolehan berada diatas 71 maka dengan demikian kedua narasumber dikatakan memiliki kompetensi pedagogik khususnya dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

b. Faktor-faktor penghambat guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar yang berpusat pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kartasura

Secara umum faktor-faktor penghambat penilaian proses dan hasil belajar peserta didik khususnya berkaitan dengan kompetensi pedagogik yang dihadapi oleh Guru pendidikan Pancasila, yaitu diuraikan menjadi 3 poin sebagai berikut:

1) Sulit dalam memahami setiap karakter peserta didik

Penilaian proses dan hasil belajar peserta didik baik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura tidak hanya untuk satu peserta didik atau satu kelas saja melainkan beberapa kelas yang diampu oleh guru Pendidikan Pancasila tersebut. Oleh karena itu seorang guru harus dapat memahami karakter peserta didik untuk mengetahui bakat dan minat peserta didik. Karena salah satu kompetensi pedagogik guru perlu dimengerti yaitu dapat memahami karakteristik peserta didik. Janawi (2011, hal. 65- 66) menyatakan bahwa menguasai karakteristik peserta didik berhubungan dengan kemampuan guru dalam memahami kondisi anak didik. Anak dalam dunia pendidikan modern adalah subyek dalam proses pembelajaran. Anak tidak dilihat sebagai obyek pendidikan, karena anak merupakan sosok individu yang membutuhkan perhatian dan sekaligus berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Anak juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya baik dari segi minat, bakat, motivasi, daya serap mengikuti pelajaran, tingkat perkembangan, tingkat inteligensi, dan memiliki perkembangan sosial tersendiri. Namun hal tersebut masih sulit dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura karena guru Pendidikan Pancasila tidak hanya mengajar satu kelas saja melainkan beberapa kelas sehingga guru tidak dapat memahami satu satu karakteristik peserta didik, sehingga dalam melaksanakan penilaian guru Pendidikan

Pancasila masih kesulitan, terutama dalam penilaian sikap. Karena guru Pendidikan Pancasila masih sulit dalam menghafal karakter setiap pesertadidik.

- 2) Banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik
Jevri Geovani (2013, hal.4) mengemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan serangkaian kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar jam pelajaran terprogram, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan minat dan bakat peserta didik serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini peserta didik diberi kebebasan untuk memilih jenis kegiatan sesuai dengan bakat dan minatnya. Keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini akan menyita waktu belajar dan istirahat peserta didik sehingga peserta didik tidak dapat belajar dengan maksimal. Hal ini tentunya akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Maka aspek banyak kegiatan yang diikuti oleh peserta didik menjadi faktor penghambat guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian. Karena guru Pendidikan Pancasila sulit dalam mengetahui kompetensi dasar yang sudah dikuasai peserta didik. Apabila peserta didik yang banyak kegiatan tersebut diberikan penilaian yang sama dengan peserta didik lain maka nantinya tidak dapat mencapai kompetensi yang sudah ditentukan.
- 3) Kurangnya waktu dalam melaksanakan penilaian
Aspek waktu menjadi faktor penghambat guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Materi yang banyak tentunya juga memakan waktu yang banyak untuk proses penilaiannya. Terlebih penilaian tidak hanya untuk satu ranah melainkan harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

4. Kesimpulan

Guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Kartasura memiliki keahlian pedagogik yang baik, terutama dalam penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Meskipun telah menguasai kompetensi pedagogik, terdapat kekurangan dalam pengembangan instrumen penilaian, khususnya pada ranah kognitif. Modul Ajar hanya mencakup instrumen untuk ranah afektif, psikomotor, dan LKPD, perlu perbaikan dengan menambahkan instrumen untuk ranah kognitif. Tahapan penilaian melibatkan perumusan tujuan, pemilihan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengelolaan hasil, dan pelaporan. Namun, dalam pelaksanaan penilaian, guru menghadapi tiga faktor penghambat, yaitu kesulitan memahami karakter peserta didik, banyaknya kegiatan ekstrakurikuler peserta didik, dan keterbatasan waktu. Perbaikan dalam memahami karakter siswa dan manajemen waktu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penilaian.

5. Daftar Pustaka

- Abidin, A. M. (2022). *Penerapan Teori Belajar Behaviorisme dalam Pembelajaran (Studi Pada Anak)*. An Nisa', 15(1). Hal. 1–8. <https://jurnal.iain-bone.ac.id>
- Ahmadi. (2017). *Studi Tentang Penguasaan Kompetensi Pedagogik Guru PKn dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada SMA Negeri 1 Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Hal. 1-18. UPT Perpustakaan UNM
- Anizar & Sardin. (2023). *Evaluasi pada Kurikulum Merdeka dan Pemanfaatan Hasil Penilaiannya*. Majalengka: Edupedia Publisher
- Anwar, Muhamma. (2018). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asrul, Ananda, R., & Rosinta. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Citapustaka Media.

- Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. (2021). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Cece, Wijaya. (1994). *Kemampuan Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2007. *Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Dewi, M. R. (2023). *Kelebihan dan Kekurangan Project Based Learning untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka*. 19(2), 213–226. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JIK>
- Eltria, Anita. (2018, Februari 26). Pentingnya Evaluasi Pembelajaran dalam Pendidikan. Diperoleh 10 September 2023 dari <https://www.kompasiana.com/>
- Faizah, D, Utomo, P, & Arifin, M. (2019). Analisis Pertanyaan Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas VII SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 253–260. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6780>
- Fatzuarni, M. (2022). Pentingnya Evaluasi dalam Proses Pembelajaran. *Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1–10.
- Febriana, Rina. (2019). *Kompetensi Guru*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fitri Kurnia. (2018). Kemampuan Guru Melakukan Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA Bayt Al-Hikmah, Pasuruan. *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 6(2), 1–9. <http://ejournal.kopertais4.or.id/>
- Gafur, A. (2012). *Desain Pembelajaran Konsep, Model, dan Aplikasinya dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ombak.
- Geovani, Jevri. (2013). *Tingkat Kematangan Sosial pada Siswa Kelas Xi Anggota Kegiatan Ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Cangkringan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. [Skripsi Tidak Dipublikasikan]. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hasbullah. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: Rajawali Pers.
- Isfandika, S. J., & Purnomo, A. (2022). Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Alat Evaluasi Pembelajaran Daring Mata Pelajaran IPS Semarang. 4(2), 109–118. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/SOSIOLIUM>
- Janawi. (2011). *Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional*. Bandung: Alfabeta
- Juwantara, R. A. (2019). Kemampuan Guru Melakukan Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 8(5), 55 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/view/4658>
- Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, Anisa Dwi Makrufi, Sunaryo Gandi, Abdul Muin, Tajeri, Ali Fakhrudin, Hamdani, S. (2022). *Pengembangan Kurikulum Merdeka*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Magdalena, I. (2019). *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Samudra biru

- Majid, N.K., Raharjo, T.K., & Supriyadi. (2017). Pengembangan Instrumen Asesmen Otentik Unjuk Kerja pada Mata Pelajaran IPA di SDN Jlamprang dan SDN Wonosari 03 Kabupaten Batang. *Journal of Educational Research and Evaluation*. 6(1): 55-62 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jere/article/view/16208>
- Mawaddah, Fitri Sagita. (2023). Assesmen dalam Kurikulum Merdeka Belajar. 3 (1): 8–13. <https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/JLPI/article/view/361/297>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Mulyasa, E. (2013). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muslich, Masnur. (2007). *KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan): Dasar Pemahaman dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Musriadi. (2016). *Profesi Kependidikan Secara Teoritis dan Aplikatif Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Deepublish
- Nasution. (2013). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Naryo. (2022). Upaya Peningkatan Kemampuan Guru dalam Evaluasi Hasil Belajar Melalui Lokakarya Berkesinambungan di SMPN 56. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13, 13–30. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1416>
- Nurjan, Syarifan. (2015). *Profesi Keguruan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. (2019). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diperoleh 31 Januari 2023, dari <https://npd.kemdikbud.bo.id/?=ukg>
- Riyadi, A. (2017). Kompetensi Guru dalam Pelaksanaan Evaluasi pembelajaran. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 15 (28), 52–67.
- Rohmawati, R., & dan Moh Muchtarom, T. (2016). *Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kecerdasan Berdemokrasi Warga Negara*. 11, 298–311. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v15i28.1933>
- Sari, I. O., Indrawadi, J., & Rafni, A. (2019). Kompetensi Pedagogik Guru PPKn dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 1 Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 2(3), 149–159. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i3.158>
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 61. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2285>
- Sofyan Ahmad, Tonih Feronika, & Burhanudin Milama. (2019). *Evaluasi Pembelajaran Sains Berbasis Kurtilas*. Yasmi
- Spencer, Lyle M, and Spencer, Singe M. (1993). *Competence at Work: Modek for Superior Performarce*. New York: John Wiley & Sons, Inc
- Subandiyah. (1993). *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudjana, N. (2006). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

- Sukardi. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suprananto M.Ed. (2014). Kompetensi Pendidik Dalam Bidang Penilaian. *Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan (SNEP), II*, 1–6
- Surapranata, Sumarna dan Hatta, Muhammad. (2004). *Penilaian Portofolio Implementasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Sutikno, M. S. (2021). *Strategi Pembelajaran*.Indramayu: CV. Adanu Abimata
- Sutopo,H,B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Susanto, Heri. (2020). *Profesi Keguruan*. Universitas Lambung Mangkurat: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Toatubun, Fathul Arifin dan Muhammad Rijal. (2018). *Profesionalitas dan Mutu Pembelajaran*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Usman,Moh User. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja.
- Wahyuni, R., & Berliani, T. (2018). Pelaksanaan Kompetensi Pedagogik Guru di Sekolah Dasar. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 27(2), 108–115. <https://doi.org/10.17977/um009v27i22018p108>
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2020). Evaluasi Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKn. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 51–61. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/5385>
- Widyawati1, Ika, Herianto,Edy, R. (2020). Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mengembangkan Tahapan Penilaian Sikap Sosial pada Mata Pelajaran PPKn di SMPN Se-Kota Mataram. *Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 134-135. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara

Tinjauan ontologis terhadap objek pengetahuan dalam filsafat ilmu

Rika Yohana Sari^{a,1}, Jasrial^{b,2}, Sulastris^{c,3}

^{abc} Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat

¹rikayohana46@gmail.com; ²jasrial@fip.unp.ac.id ; ³sulastris_aip@fip.unp.ac.id

* rikayohana46@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 14 Maret 2024 Direvisi: 31 Maret 2024 Disetujui: 17 Mei 2024 Tersedia Daring: 6 Juni 2024</p> <p><i>Kata Kunci:</i> Filsafat Ilmu Ontologi</p>	<p>Filsafat ilmu mencakup pemikiran reflektif tentang landasan ilmu dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan pandangan ontologis terhadap objek pengetahuan dalam filsafat ilmu. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah studi literatur, di mana penulis melakukan tinjauan terhadap berbagai buku dan karya ilmiah terkait. Hasil analisis menyimpulkan bahwa studi filsafat melibatkan eksplorasi integrasi berbagai jenis ilmu melalui pemeriksaan aspek ontologis. Hal ini menjelaskan bahwa ruang lingkup objek pengetahuan tidak hanya terbatas pada yang konkret, tetapi juga mencakup aspek metafisik atau abstrak. Keduanya, baik konkret maupun abstrak, merupakan bagian dari bidang studi yang saling terkait. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial manusia, menjadi indikator progres suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi ahli filsafat untuk merumuskan landasan berpikir yang rasional dan terstruktur terkait dengan penelitian keilmuan. Dorongan ini menginspirasi lahirnya filsafat ilmu, cabang ilmu yang secara spesifik mengkaji esensi pengetahuan itu sendiri. Dampaknya, menghasilkan ragam bidang pengetahuan, termasuk di antaranya ilmu sosial beserta semua cabangnya. Dalam konteksnya, ontologi menekankan esensi dari suatu pengetahuan, dengan tujuan memperkuat kebenaran dari pengetahuan tersebut</p>

	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> Philosophy Science Ontology</p>	<p><i>Philosophy of science encompasses reflective thinking about the foundations of science and its relationship with human life. The purpose of this writing is to elaborate ontological views on the objects of knowledge in the philosophy of science. The method used in the research is literature study, where the author conducts a review of various books and related scholarly works. The analysis results conclude that philosophical studies involve exploring the integration of various types of knowledge through an examination of ontological aspects. This explains that the scope of objects of knowledge is not only limited to the concrete, but also includes metaphysical or abstract aspects. Both, concrete and abstract, are part of interrelated fields of study. Science plays a crucial role in human social life, serving as an indicator of a nation's progress. Therefore, it is important for philosophers to formulate rational and structured frameworks related to scholarly research. This impetus inspires the emergence of the philosophy of science, a branch of knowledge specifically examining the essence of knowledge itself. As a result, it generates various fields of knowledge, including social sciences and all their branches. In its context, ontology emphasizes the essence of knowledge, with the aim of strengthening the truth of that knowledge.</i></p>



How to Cite: SariR., JasrialJ., & SulastrisS. (2024). Tinjauan ontologis terhadap objek pengetahuan dalam filsafat ilmu. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(1), 12-20. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i1.2378>

1. Pendahuluan

Pengetahuan berasal dari eksplorasi dan rasa ingin tahu dari manusia terhadap berbagai hal. Setiap bentuk pengetahuan memiliki ciri khasnya sendiri tergantung pada metode perolehannya dan subjek yang menjadi fokusnya. Manusia mengembangkan pengetahuan karena dua faktor utama: Pertama, kemampuan bahasa manusia untuk menyampaikan ide dan konsep yang mendasari informasi tersebut. Kedua, kemampuan manusia untuk berpikir secara logis dan mengikuti alur penalaran yang sistematis. (Yasin, et. al. 2018)

Manusia, sebagai ciptaan Ilahi, diberi anugerah berupa kapasitas fisik, spiritual, dan kecerdasan kognitif yang membedakannya dari entitas lainnya. Tambahan, manusia diidentifikasi sebagai entitas pertama yang mengadopsi sistem bahasa. Keunikan ini menjadikan manusia memiliki tiga dimensi unik dibandingkan dengan entitas lainnya, yakni penguasaan bahasa, kemampuan rasionalitas, dan keanggunan fisik. Berkat keistimewaan ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui proses pemikiran, pengalaman, dan persepsi. Dalam kerangka pengetahuan, ada berbagai jenis, salah satunya ialah ilmu. Ilmu, sebagai bagian dari pengetahuan, menekankan pada realitas empiris sebagai basis kebenarannya. Untuk memperoleh pengetahuan, ilmu menggunakan metode ilmiah yang menggabungkan logika deduktif dan induktif (Salam, 2019)

Pengetahuan ilmiah adalah ekspresi dari pemahaman manusia tentang alam semesta, yang diungkapkan melalui proses formulasi yang terorganisir dan logis. Ada tiga faktor yang mendorong kemajuan pengetahuan ilmiah: Pertama, keinginan untuk mengeksplorasi yang timbul dari kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup. Kedua, keinginan untuk memahami lebih dalam dan mencari pola yang mendasari kehidupan. Ketiga, keinginan untuk merenungkan tempat manusia dalam konteks realitasnya. Seperti yang diuraikan oleh Nadia (Farin. 2022,). Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang mengagumkan, yang memiliki dampak signifikan pada perkembangan kehidupan manusia.

Manusia dan ilmu pengetahuan hadir sebagai manifestasi dari dorongan batin manusia untuk memahami dan mengeksplorasi alam semesta ini. Ilmu pengetahuan, sebagai hasil dari refleksi pikiran manusia, menjadi cahaya penerang dalam perjalanan peradaban, membantu manusia memahami eksistensinya dan meraih kesempurnaan hidup. Ketika manusia dihadapkan pada masalah, mereka terdorong untuk bertanya, mencari jawaban, dan menemukan kebenaran di sekitar mereka. Dengan demikian, manusia telah menjadi entitas yang mampu menjelajahi bidang pengetahuan, mencari pencerahan dalam setiap aspek kehidupan. Ilmu pengetahuan, sebagai jawaban atas rasa ingin tahu manusia, terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, menjadi alat yang digunakan untuk menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam perjalanan kehidupan. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai hasil dari dorongan alami manusia untuk memahami dunia di sekitarnya serta menggali kebenaran yang tersembunyi di balik misteri kehidupan (Rokhmah, 2021)

Secara mendasar, filsafat memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat memegang peran kunci dalam memberikan landasan bagi pemikiran manusia dalam memperluas pengetahuan mereka. Filsafat secara mendalam menggali dan mengeksplorasi segala aspek alam semesta untuk memahami esensi yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, filsafat dianggap sebagai sumber utama dari semua pengetahuan yang ada. Sedangkan ilmu bertugas untuk menggambarkan fenomena alam semesta, filsafat bertanggung jawab untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut berdasarkan refleksi dan pemikiran yang luas. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari Kehadiran filsafat sangat penting, karena inti dari kegiatan filsafat adalah mencari kebenaran yang mendasari segala hal. (Lubis, et. al. 2023)

Dalam ranah ilmiah, aktivitas ini didorong oleh tiga pertanyaan pokok: apa yang ingin diketahui, bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut, dan apa nilai dari pengetahuan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diperlukan pendekatan berpikir yang radikal, sistematis, dan universal, yang merupakan esensi dari filsafat ilmu. Selain sebagai pendekatan hidup dan metode berpikir, filsafat juga dianggap sebagai cabang ilmu yang berupaya untuk menemukan hakikat atau inti dari sebuah fenomena. Inti tersebut seringkali sangat dalam dan hanya dapat dimengerti melalui akal manusia. Oleh karena itu, dalam upaya memahami hakikat sebuah fenomena, abstraksi menjadi kunci, di mana akal manusia berusaha menghilangkan aspek-aspek tertentu untuk mengungkap esensi atau sifat mendasar. Seiring berjalannya waktu, ilmu itu sendiri terbagi menjadi berbagai disiplin, masing-masing dengan metode, sifat, objek, tujuan, dan kriteria yang berbeda (Ibrahim, 2017)

Beberapa ahli telah menjelaskan konsep filsafat ilmu. Contohnya, Liang Gie menyatakan bahwa filsafat ilmu meliputi segala pemikiran yang bersifat reflektif terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang dasar-dasar pengetahuan serta hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Di sisi lain, menurut Jujun S. Suriasumantri, tujuan dari filsafat ilmu adalah untuk menyelidiki dan menilai metode-metode berpikir ilmiah, serta berusaha untuk menemukan nilai dan arti penting dari upaya ilmiah secara menyeluruh. (Pesoko, 2018)

Filsafat ilmu membimbing setiap langkah dalam usaha memperoleh pengetahuan yang sah secara ilmiah. Dalam konteks ini, segala hal yang termasuk dalam ranah ilmu dikenal sebagai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ini merupakan hasil dari pengumpulan data yang telah disusun dengan rapi dan terstruktur, mengikuti prinsip-prosedur, metodologi, teknis, dan normatif akademis. Dengan demikian, pengetahuan ilmiah telah melewati serangkaian uji kebenaran dan telah diverifikasi keakuratannya karena diperoleh melalui proses yang disengaja, aktif, terstruktur, dan sistematis, serta telah diperiksa secara cermat untuk memastikan kevalidannya. (Sanprayogi, et. al. 2017)

Ketika memahami prinsip-prinsip filsafat ilmu, sangatlah penting untuk mengakui tiga elemen utama yang menjadi pijakan dalam menjalankan proses berfilsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga elemen ini menjadi dasar yang komprehensif dalam memahami sifat dan ruang lingkup ilmu. Dalam konteks ilmu, terdapat beragam elemen seperti objek, pernyataan, proposisi, dan karakteristik yang sesungguhnya menjadi titik fokus dalam ketiga aspek filsafat tersebut. Filsafat ilmu memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengembangan ilmu serta memberikan pandangan yang mendalam terkait dengan aspek moral yang terkandung dalam setiap disiplin ilmu, baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Setiap disiplin ilmu memiliki identitasnya sendiri yang menjelaskan tentang objek yang dikaji (ontologi), metode memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut (epistemologi), dan nilai-nilai yang dimiliki oleh disiplin ilmu tersebut (aksiologi). Tiga aspek ini saling berkaitan, di mana pembahasan mengenai epistemologi ilmu harus mempertimbangkan ontologi dan aksiologi ilmu juga. Dalam konteks ini, pemahaman ontologi ilmu sangatlah terkait dengan pemahaman epistemologi ilmu, dan pengembangan epistemologi

ilmu sangatlah dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam aksiologi ilmu, dan seterusnya. Pengembangan filsafat ilmu didasarkan pada pendekatan berpikir sistematis yang mengharuskan integrasi yang konsisten antara ketiga aspek ini. Oleh karena itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam kajian filsafat ilmu. (Rokhmah, 2021)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam diskusi mengenai filsafat ilmu, tidak dapat dipisahkan dari tiga aspek utama yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan ontologi dalam konteks filsafat ilmu. Sebagai hasilnya, penulis merasa tertarik untuk menjelajahi topik tersebut lebih dalam dan mengekspresikannya melalui sebuah artikel yang berjudul "Tinjauan Ontologis terhadap Objek Pengetahuan dalam Filsafat Ilmu". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan Tinjauan Ontologis terhadap Objek Pengetahuan dalam Filsafat Ilmu.

2. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu Ontologis terhadap Objek Pengetahuan dalam Filsafat Ilmu. Penulisan artikel ini mengandalkan informasi sekunder yang diperoleh dari literatur yang relevan penelitian sebelumnya dan disitir sesuai dengan norma-norma ilmiah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan terkini terkait dengan topik tersebut, dengan harapan dapat menghasilkan wawasan baru dan memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan

3. Hasil dan Pembahasan

A. Integrasi Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Aspek Ontologi

Ontologi merupakan ilmu yang mempelajari batas-batas ruang lingkup yang menjadi fokus penelitian dan interpretasi esensi dari realitas atau hakikat keberadaan sesuatu. Artinya ontologi menggambarkan keberadaan atau kenyataan yang diperlihatkan hakikat kebenaran sesuatu (Hayati, 2021). Ontologi membahas masalah-masalah mengenai hakikat ilmu, meliputi apa itu ilmu dan bagaimana ilmu itu bekerja. Menyebut ontologi saja akan menjawab pertanyaan tentang apa, apa yang bisa terjadi diketahui apa sebenarnya sains itu? (Salabi, 2021).

Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan subjek atau objek ilmu pengetahuan? Ini ada dalam teologi serta ilmu pengetahuan umum. Ketika membahas pokok bahasan ilmu pengetahuan, hal itu perlu untuk memasukkan segala sesuatu yang ada di alam. Sudut pandang tentang integrasi ilmu pengetahuan dari sudut pandang ontologi sudah tertera dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hashar ayat 22 yang berbunyi:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Terjemahan "Dialah Allah SWT, tidak ada Tuhan yang lain siapa yang mengetahui baik yang gaib maupun yang kelihatan. Dialah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang". (QS. Al-Hashar: 22)

Pandangan ontologi ilmu juga didasarkan pada Al-Qur'an dalam QS. Al-Alaq ayat 1-5.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Terjemahan: 1) Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2) Menciptakan manusia dari kemelekatan zat. 3) Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah. 4) Siapa yang diajar dengan pena. 5) Mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya”(QS. Al-Alaq: 1-5)

Dari ayat inilah Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Mengetahui semuanya. Hal ini menggambarkan bahwa manusia mempelajari aspek abstrak dan konkrit atas petunjuk Allah SWT. Artinya, kajian ilmu tidak hanya menyangkut hal itu saja dengan alam semesta yang berkemampuan indra, tetapi juga dengan alam semesta abstrak yang memerlukan analisa dan kajian mendalam. Dengan demikian, ontologi ilmu mencakup keduanya hal-hal yang abstrak dan konkrit, atau hal-hal yang bersifat materi dan immateri. Artinya, objeknya Kajian ilmiah bukan hanya yang kasat mata namun juga tak kasat mata. Ilmu-ilmu umum lahir dari objek kajian yang kasat mata atau konkrit, begitu pula ilmu-ilmu agama lahir dari kajian abstrak.

Armahedi Mahzar menyebutkan bahwa iqra' (membaca) merupakan petunjuk tentang integrasi. Perintah ini menjelaskan evolusi ilmu pengetahuan. Membaca, baik tekstual maupun kontekstual, membantu dalam pengembangan pengetahuan. Wahyu dalam bentuk tekstual dan alam semesta melalui bentuk kontekstual maka adalah istilah "Rabi". Ini menegaskan perkembangan moral atau agama dalam upaya memahaminya petunjuk Allah SWT. Lebih lanjut seperti yang dikatakan Armahedi Mahzar isu sentral integrasi ada dalam sejarah Islam pada masa itu Periode Bani Umayyah dan Abbasiyah (Slamet, 2019).

B. Tinjauan Ontologis terhadap Objek Pengetahuan dalam Filsafat Ilmu

Ontologi, secara etimologi, berasal dari Bahasa Yunani dengan akar kata "Ontos" yang berarti "yang terdapat" dan "Logos" yang berarti "ilmu". Secara sederhana, ontologi dapat dianggap sebagai ilmu yang mempertanyakan eksistensi dan keberadaan segala sesuatu. Dalam konteks sebutannya, ontologi menjadi bagian dari ilmu metafisika yang membahas tentang hakikat kehidupan dan meliputi segala sesuatu yang ada atau mungkin ada. (Mahfud, 2018)

Perspektif ontologi menyoroti pentingnya pemahaman terhadap apa yang ingin kita ketahui dan sejauh mana kita ingin mengeksplorasi pengetahuan tersebut. Ontologi mendalami teori-teori yang ada, yang pada dasarnya menjelaskan objek-objek yang menjadi fokus kajian dalam suatu ilmu. Secara umum, ontologi sering dihubungkan dengan metafisika karena menangani hakikat dari apa yang ada. Pembahasan ontologi menjadi sentral dalam bidang filsafat karena membahas tentang esensi dari realitas atau kenyataan. Fokus utamanya adalah memahami aspek-aspek rasional dari keberadaan atau subjek subjek yang ingin kita ketahui sejauh mana.

Menurut Jujun S. Suriasumantri, awalnya filsafat memfokuskan perhatiannya pada berbagai bidang seperti logika, etika, metafisika, dan politik. Seiring berjalannya waktu, cabang-cabang filsafat yang lebih spesifik pun mulai berkembang, termasuk di dalamnya filsafat ilmu. Penggunaan istilah "ilmu" sendiri berasal dari Bahasa Arab, "Alima," yang secara harfiah berarti "pengetahuan." Dalam konteks Bahasa Indonesia, istilah tersebut dikenal dengan "Science," yang juga memiliki arti yang sama, yaitu "pengetahuan.". Dengan demikian, ilmu dapat dipahami sebagai pengetahuan yang meliputi berbagai bidang kajian (Wahyudi, et. al. 2024)

Kajian ontologi dalam konteks pandangan Islam menghubungkan dengan sifat objek ilmu, yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, terdapat objek ilmu yang memiliki sifat materi, yang dapat diamati, diraba, dan dirasakan. Contoh-contoh termasuk berbagai cabang ilmu, seperti sains, eksak, politik, sosial, budaya, dan psikologi, membentuk lanskap pengetahuan manusia. Selain itu, terdapat aspek non-materi dalam ilmu yang tidak dapat diobservasi atau diraba secara langsung, namun lebih berkaitan dengan dimensi spiritual. Contohnya adalah objek yang membahas tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Pada intinya, ontologi membahas esensi "keberadaan" dari ilmu pengetahuan, objek pengetahuan, dan hubungan antara subjek dan objek ilmu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, pembahasan ontologis menitikberatkan pada keberadaan substansial ilmu pengetahuan itu sendiri, menajaki

apakah ilmu pengetahuan tersebut bersifat nyata atau abstrak. Sebagai contoh, dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam, pendekatan ontologis akan mempertimbangkan apakah Manajemen Pendidikan Islam tidak hanya merupakan sebuah program studi, tetapi juga memiliki substansi ilmu yang diberikan di dalamnya. Dengan demikian, studi ontologis bertujuan untuk menguji dan mengesahkan eksistensi suatu cabang ilmu pengetahuan.

Ontologi ilmu memperhitungkan semua aspek kehidupan yang dapat dikenali melalui indra manusia. Ilmu berfokus pada objek-objek empiris seperti batuan, binatang, tumbuhan, manusia, serta berbagai fenomena atau peristiwa yang penting bagi kehidupan manusia. Dalam lingkup objeknya, ilmu digambarkan sebagai pengetahuan empiris di mana objek yang tidak dapat diakses manusia tidak termasuk dalam cakupan penelitian.

Konsep dasar tentang ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Plato melalui teori idea. Menurut pandangannya, setiap entitas dalam alam semesta memiliki ideanya sendiri. Plato menjelaskan bahwa idea adalah konsep universal dari setiap entitas yang menjadi hakikat atau esensi dari wujudnya. Idea tersebut eksis di balik realitas yang nyata dan dianggap abadi oleh Plato. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada benda-benda yang diamati atau ditangkap oleh pancaindra manusia dianggap sebagai bayangan dari ide-ide tersebut. Sehingga, apa yang tampak oleh pancaindra manusia hanyalah ilusi belaka, bukan hakikat sesungguhnya (Rokhmah, 2021)

St. Augustine juga menyampaikan argumennya tentang ontologi, yang menyatakan bahwa manusia, melalui pengalamannya, menyadari adanya kebenaran yang tersirat dalam alam semesta ini. Meskipun begitu, terkadang manusia merasa yakin bahwa apa yang dia pahami adalah benar, tetapi juga seringkali merasa ragu tentang kebenaran tersebut. Bagi Augustine, akal manusia pada dasarnya menyadari bahwa di luar dirinya ada suatu kebenaran yang tetap, yang menjadi sumber pengetahuan manusia tentang apa yang benar. Kebenaran yang tetap ini dianggap oleh Augustine sebagai kebenaran yang mutlak, yang ia identifikasi sebagai Tuhan.

Ontologi adalah cabang ilmu yang mempertimbangkan hakikat suatu kenyataan atau eksistensi dari dua perspektif utama: pertama, secara kuantitatif, dengan mempertimbangkan apakah kenyataan tersebut bersifat individual atau kolektif; kedua, secara kualitatif, dengan mengeksplorasi apakah kenyataan tersebut memiliki atribut-atribut tertentu. Secara sederhana, ontologi dapat didefinisikan sebagai studi yang secara kritis mengeksplorasi realitas atau kenyataan yang konkret. Aspek-aspek ontologi dari suatu disiplin ilmu seharusnya dijelaskan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan metode ilmiah, memiliki struktur yang sistematis dan terhubung satu sama lain dalam suatu keseluruhan, konsisten tanpa adanya kontradiksi, didasarkan pada logika yang benar, melihat objek secara holistik atau multidimensional, menyelami akar persoalan atau esensi dari objek tersebut, dan memiliki relevansi yang universal yang berlaku di berbagai konteks. (Rokhmah, 2021)

Aspek ontologi dari suatu bidang ilmu seharusnya disusun secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal memiliki makna sebagai berikut:

1. Metodis: Pengkajian ontologis haruslah dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang teruji dan teratur, sehingga langkah-langkah penelitian dapat direplikasi dan diuji kebenarannya.
2. Sistematis: Penyusunan ontologi haruslah dilakukan secara terstruktur dan terorganisir, di mana konsep-konsep yang ada saling berkaitan dan membentuk suatu keseluruhan yang koheren.
3. Koheren: Setiap unsur dalam ontologi haruslah saling mendukung dan tidak mengandung kontradiksi, sehingga tidak ada kebingungan atau ketidakjelasan dalam pemahaman hakikat suatu kenyataan.
4. Rasional: Konstruksi ontologi haruslah didasarkan pada logika dan kaidah berpikir yang benar, sehingga dapat dipahami dan diterima secara intelektual.

5. Komprehensif: Ontologi harus mampu melihat objek kajian dari berbagai sudut pandang atau dimensi yang relevan, sehingga pemahaman terhadap realitas menjadi lebih lengkap dan mendalam.
6. Radikal: Penyusunan ontologi harus mengupas hingga ke akar persoalan atau esensi dari suatu kenyataan, tanpa menyingkakan aspek yang belum terungkap atau dipahami.
7. Universal: Ontologi yang dibangun harus memiliki muatan kebenaran yang berlaku secara umum dan relevan di berbagai konteks atau situasi, sehingga memiliki nilai atau kegunaan yang luas.

Ontologi ilmu pengetahuan memiliki karakteristik yang mencakup beberapa aspek. Pertama, ilmu berasal dari proses penelitian yang sistematis. Kedua, ontologi ini didasarkan pada konsep pengetahuan empiris, tanpa adanya konsep wahyu. Ketiga, pengetahuan dalam ontologi ilmu pengetahuan cenderung berbasis pada pemikiran yang rasional, objektif, dan sistematis, serta dijalankan dengan metodologi yang observatif dan netral. Selanjutnya, prinsip-prinsip seperti verifikasi, eksplanatif, dan keterbukaan terhadap pengujian ulang, serta sikap skeptisisme yang radikal, menjadi landasan penting dalam pendekatan ini. Fokusnya adalah pada penelitian kausalitas dan implementasi ilmu pengetahuan dalam perkembangan teknologi. Ontologi ini juga mengakui sifat relatif dari pengetahuan dan konsep, dan menerapkan logika ilmiah sebagai landasan utama. Selain itu, pendekatan ini mempertimbangkan berbagai hipotesis dan teori ilmiah yang relevan, sambil tetap memperhatikan konsep tentang hukum-hukum alam yang telah terbukti melalui berbagai bukti empiris. (Adib dalam Rokhmah, 2021)

Objek pengetahuan sering kali merupakan representasi yang disederhanakan dari kompleksitas kejadian empiris, yang memerlukan penyederhanaan karena keberagaman sampel dan faktor yang terlibat di dalamnya. Ilmu tidak hanya bertujuan untuk mereproduksi kejadian, melainkan untuk memahami alasan di baliknya dan membatasi aspek-aspek esensialnya. Proses ilmiah bertujuan untuk mengungkap inti pengetahuan mengenai objek tersebut, dengan membuat asumsi-asumsi yang mendukung arah dan pendekatan ilmiah. Suatu ilmu dapat diterima selama asumsi-asumsi yang dibuat tentang objek penelitiannya terbukti benar. Ontologi, sebagai bagian penting dari ilmu pengetahuan, mencoba untuk merumuskan esensi dari objek pengetahuan itu sendiri, memberikan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep dalam suatu bidang ilmu. Dengan demikian, ontologi merupakan landasan yang penting bagi berbagai bidang ilmu empiris seperti fisika, sosiologi, antropologi, kedokteran, dan lainnya, karena ia menguraikan esensi dari konsep-konsep yang dipelajari dalam bidang tersebut. (Utama, 2021)

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tinjauan filosofis tersebut dan analisis integrasi ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa studi tentang filsafat memerlukan mengeksplorasi integrasi ilmu pengetahuan melalui penyelidikan aspek ontologi menjelaskan bahwa objek kajian atau bidang kajian ilmu pengetahuan tidak terbatas pada hanya yang bersifat fisik atau konkrit, tetapi juga metafisik atau abstrak. Konkret dan ilmu-ilmu abstrak keduanya merupakan bidang studi yang terintegrasi. Ilmu pengetahuan telah menjadi elemen vital dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, menjadi indikator kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Tingkat kemajuan suatu bangsa seringkali berkorelasi dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya; semakin tinggi tingkat ilmu pengetahuan suatu bangsa, semakin modern pula kehidupan sosial masyarakatnya. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengetahuan dapat mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Maka, pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat mendorong masyarakat untuk bersungguh-sungguh dalam memperdalam pengetahuan tersebut. Kebutuhan akan ilmu pengetahuan juga mendorong filosof untuk membangun pola pikir yang logis dan sistematis dalam memahami dan mengkaji ilmu pengetahuan. Inilah yang inisiator filsafat ilmu sebagai cabang ilmu

pengetahuan yang secara khusus membahas tentang sifat dan hakikat ilmu itu sendiri. Dalam konteks ini, ontologi sebagai bagian dari filsafat ilmu berfokus pada hakikat dari suatu pengetahuan, berusaha membuktikan dan menganalisis kebenaran dari ilmu pengetahuan tersebut.

5. Daftar Pustaka

- Farin, S. E. (2022). Peranan Filsafat Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan Ilmu Sosial. Tugas Mata Kuliah Mahasiswa, 309–318. <http://publikasipips.ulm.ac.id/index.php/tmkm/article/view/177>
- Hayati, N. (2021). Konsep Manusia Berdasarkan Tinjauan Filsafat (Telaah Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Manusia). *Forum Paedagogik*, 12(1), [23 p.]
- Ibrahim, Duski. 2017. *Filsafat Ilmu dari Penumpang Asing untuk Para Tamu* (Palembang: NoerFikri, 2017), 19
- Khomsatun, Novi. 2019. *Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi*, EDUCREATIVE: Jurnal Pendidikan Kreatif Anak, Vol. 4, No. 2, 2019, 229-231.
- Lubis, et. al. 2023. *Philosophy Of Science As The Historical Basis Of The Development Of Science And Knowledge*. 2023. Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities. P - ISSN : 2716-5132, E - ISSN : 2723-0783 Vol. 4 No. 2 August 2023 Page: 47 – 50
- Mahfud. 2018. Mengenal Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam Pendidikan Islam, Cendekian: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No.1, 2018.
- Pesoko, Herowati. 2018. *Ilmu Filsafat dalam Perspektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2018), 25-26.
- Rokhmah, Dewi. 2021. Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi. CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman Volume 7, Nomor 2, Desember 2021; P-ISSN 2443-2741; E-ISSN 2579-5503
- Salabi, A. S. (2021). Konstruksi Keilmuan Islam (Studi Pemikiran Ibnu Rusyd tentang Ontologi dan Epistimologi). *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 12(1), 47–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/itqan.v12i1.188>
- Salam, Safrin. 2019. *Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu*, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 18, No. 2, 2019, 886-887.
- Sanprayogi, et. al. 2017. *Aksiologi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Keilmuan*, AL MURABBI, Vol. 4, No. 1, 2017, 106-108.
- Slamet. (2019). Konsep Integrasi Ilmu dan Agama. *As-Salam Jurnal Ilmiah IlmuIlmu Keislaman*, II(03), 231–245.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. 2021. *Filsafat Ilmu dan Logika Manajemen dan Pariwisata* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 7-10.
- Wahyudi, et. al. 2024. Tinjauan Cabang Filsafat (Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi) dalam Buku Bahasa Indonesia Kelas IV SDN Patengteng 1. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* Vol.2, No.1 Februari 2024 e-ISSN: 2985-8666; p-ISSN: 2985-9573, Hal 34-45 DOI: <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.625>

Yasin, et. al. 2018. *Filsafat Logika dan Ontologi Ilmu Komputer*, JISAMAR: Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, Vol. 2, No. 2, 2018, 68-69.)

Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital terhadap Efisiensi Administrasi Pendidikan

Rika Yohana Sari^{a,1}, Ahmad Subandi^{b,2}, Irsyad Irsyad^{c,3}

^{abc} Universitas Negeri Padang, Jl. Prof.Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

¹ rikayohana46@gmail.com, ² sabandi@fip.unp.ac.id, ³ irsyad@fip.unp.ac.id

* Corresponding Author: rikayohana46@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 04 Maret 2024

Direvisi: 17 April 2024

Disetujui: 25 Mei 2024

Tersedia Daring: 11 Juni 2024

Kata Kunci:

Administrasi

Digital

Pendidikan

SIM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, karakteristik, dan dampak penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis digital terhadap efisiensi administrasi pendidikan. Metode yang diterapkan adalah library research atau studi literatur, di mana peneliti menghimpun informasi dari sumber-sumber seperti buku dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis digital memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi administrasi pendidikan. Sistem ini memungkinkan integrasi teknologi informasi, otomatisasi tugas administratif, dan pengelolaan data yang terintegrasi dari berbagai sumber, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. SIM juga dilengkapi dengan kebijakan keamanan yang kuat dan mekanisme perlindungan data sensitif. Penggunaan SIM digital memberikan manfaat seperti peningkatan aksesibilitas data, pengurangan kesalahan manusia, dan peningkatan akurasi data. Lembaga pendidikan dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien, memperbaiki komunikasi dan kolaborasi, serta melacak kinerja dengan lebih tepat waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan SIM digital meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan manajemen, dan kebijakan keamanan.

ABSTRACT

Keywords:

Administration

Digital

Education

SIM

This research aims to explore the concepts, characteristics and impact of using digital-based Management Information Systems (SIM) on the efficiency of educational administration. The method applied is library research or literature study, where researchers collect information from sources such as books and documents that are relevant to the research focus. The information collected is then analyzed qualitatively. Research findings show that the use of digital-based information systems has a significant influence on the efficiency of educational administration. This system enables the integration of information technology, automation of administrative tasks, and integrated management of data from various sources, which ultimately supports better decision making. SIM also comes with strong security policies and sensitive data protection mechanisms. The use of digital SIMs provides benefits such as increased data accessibility, reduced human error, and increased data accuracy. Educational institutions can manage resources more efficiently, improve communication and collaboration, and track performance in a more timely manner. Factors that influence the use of digital SIMs include

technological infrastructure readiness, human resource capabilities, management support, and security policies.

© 2024, Rika Yohana S, Ahmad Subandi, Irsyad
This is an open access article under CC BY-SA license



How to Cite: SariR., SubandiA., & IrsyadI. (2024). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital Terhadap Efisiensi Administrasi Pendidikan. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(1), 21-29. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i1.2389>

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran krusial dalam pembangunan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, penting untuk memperhatikan berbagai pengembangan di sektor pendidikan (Agustini & Tarigan, 2023). Kualitas pendidikan yang baik ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah efisiensi administrasi pendidikan (Rofiatul Hasanah, 2024). Proses administrasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi peserta didik. Dengan efisiensi administrasi yang baik, pengelolaan sumber daya dapat lebih optimal, dan guru serta tenaga pendidik lainnya dapat fokus pada tugas utama mereka dalam mendukung prestasi peserta didik (Ende Widiyana, 2023).

Efisiensi administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan data siswa, perencanaan jadwal, dan distribusi sumber daya yang tepat (Angeli Koresy, 2024). Dengan administrasi yang efisien, lembaga pendidikan dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif, termasuk waktu, anggaran, dan tenaga kerja. Ini berkontribusi pada kelancaran operasional sekolah atau lembaga Pendidikan. Selain itu, efisiensi administrasi memungkinkan guru dan tenaga pendidik lainnya untuk fokus pada tugas utama mereka, yaitu mendukung prestasi peserta didik. Dengan berkurangnya beban administrasi yang harus ditangani oleh guru, mereka dapat lebih memusatkan perhatian pada pembelajaran, pengembangan materi, dan interaksi langsung dengan peserta didik. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kualitas pengalaman belajar dan prestasi akademik peserta didik.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara lembaga pendidikan mengelola administrasi mereka melalui penggunaan sistem informasi manajemen berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi telah memfasilitasi munculnya sistem informasi manajemen berbasis digital yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sistem-sistem ini menjadi solusi yang semakin populer dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi pendidikan (Sholeh Kurniandini, 2022).

Sistem informasi manajemen berbasis digital menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pengelolaan berbagai aspek administrasi pendidikan, termasuk data siswa, data guru, kurikulum, keuangan, dan proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengakses informasi secara real-time dan memperbaiki efisiensi dalam berbagai proses administrasi, seperti manajemen data siswa dan guru, pemantauan absensi, dan pengelolaan keuangan (Febrianti et al., 2023).

Salah satu keuntungan utama dari penggunaan sistem informasi manajemen berbasis digital adalah kemampuan untuk meminimalisasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas administrasi. Tugas yang sebelumnya memakan waktu lama, seperti pencatatan data

siswa atau pengelolaan jadwal, dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat melalui sistem digital (Kurniati et al., 2021). Hal ini menghemat waktu dan tenaga, memungkinkan fokus lebih pada aktivitas yang lebih produktif. Sistem informasi manajemen berbasis digital menawarkan berbagai kemudahan dan kecepatan dalam pengelolaan administrasi pendidikan, termasuk pengelolaan data siswa, guru, kurikulum, keuangan, dan proses pembelajaran (Agarina. 2024).

Selain itu, penggunaan sistem informasi manajemen digital juga dapat mengurangi tingkat kesalahan administrasi. Ketika data dikelola secara otomatis dan terintegrasi, risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan data yang dihasilkan (Elly. 2023). Hal ini memastikan bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan data administrasi lebih akurat dan dapat diandalkan. Penerapan sistem informasi manajemen berbasis digital juga dapat memberikan kemudahan bagi staf administrasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Sistem ini dapat memberikan akses cepat ke informasi yang diperlukan, memungkinkan staf untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan produktif.

Dengan akses cepat ke informasi yang diperlukan, staf dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan produktif. Ini membantu meningkatkan produktivitas keseluruhan tim administrasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia (Nurhusain et al., 2023). Secara keseluruhan, penggunaan sistem informasi manajemen berbasis digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara lembaga pendidikan mengelola administrasi mereka. Dengan menyediakan akses cepat, akurat, dan efisien ke data dan proses administrasi, sistem-sistem ini membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara lebih efektif (Hidayah et al., 2023).

Namun, meskipun terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem informasi manajemen berbasis digital (Loryana & Syahidul, 2021), penelitian mengenai pengaruh penggunaan sistem ini terhadap efisiensi administrasi pendidikan masih diperlukan. Penelitian ini dapat membantu memahami sejauh mana sistem informasi manajemen digital dapat meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan kualitas administrasi pendidikan, penelitian ini menjadi relevan dan penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana penggunaan sistem informasi manajemen digital dapat mempengaruhi efisiensi administrasi pendidikan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen berbasis digital dalam administrasi pendidikan. Pemahaman tentang faktor-faktor ini dapat membantu lembaga pendidikan dalam merancang strategi implementasi yang optimal. Penelitian ini juga berpotensi memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pendidikan mengenai cara memanfaatkan sistem informasi manajemen digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat memaksimalkan manfaat dari penggunaan sistem informasi manajemen digital.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen berbasis digital terhadap efisiensi administrasi pendidikan. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diinginkan dapat memberikan sumbangan penting bagi perkembangan tata kelola administrasi pendidikan ke depannya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menemukan strategi efektif untuk meningkatkan pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis digital dalam tata kelola administrasi pendidikan. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dalam upaya meningkatkan efisiensi serta mutu tata kelola administrasi pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan yang signifikan bagi dunia pendidikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi administrasi melalui penggunaan sistem informasi manajemen berbasis digital.

2. Metode

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode studi pustaka, yang juga dikenal sebagai library research. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Setelah semua sumber data terkumpul, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti memeriksa dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian dan mengeksplorasi aspek-aspek yang relevan dengan lebih cermat.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Karakteristik Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital

Konsep sistem informasi manajemen (SIM) berbasis digital merupakan evolusi dari penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dan memproses informasi dalam organisasi, termasuk dalam konteks Pendidikan (Purwadi. 2023). Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, konsep SIM berbasis digital dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Integrasi Teknologi Informasi: SIM berbasis digital mengintegrasikan teknologi informasi, komputer, perangkat lunak, dan sistem komunikasi untuk mengelola data dan informasi secara efektif.
- b. Pengelolaan Data Terintegrasi: Sistem ini memungkinkan pengelolaan data yang terintegrasi dari berbagai sumber dan departemen dalam organisasi, sehingga memudahkan akses dan pengambilan keputusan.
- c. Otomatisasi Proses: SIM berbasis digital mengotomatiskan banyak tugas administratif, seperti pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan jadwal, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia.
- d. Analisis Data yang Akurat: Sistem ini memungkinkan analisis data yang akurat, memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
- e. Keamanan Data: SIM berbasis digital dilengkapi dengan mekanisme keamanan data yang canggih untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah.
- f. Kolaborasi dan Komunikasi: Sistem ini memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam organisasi, baik itu guru, staf administrasi, atau siswa, melalui platform digital.
- g. Scalability dan Kustomisasi: SIM berbasis digital dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi atau lembaga pendidikan.

Dengan demikian, konsep SIM berbasis digital menyoroti pentingnya integrasi teknologi informasi dalam mengelola informasi, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi administrasi dalam organisasi, termasuk di bidang pendidikan.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis digital memiliki sejumlah karakteristik yang membuatnya sangat efektif dalam mengelola administrasi pendidikan dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Berikut penjelasan dari setiap karakteristik yang disebutkan:

- a. Interoperabilitas: Sistem ini mampu berinteraksi dengan berbagai sistem lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Hal ini memungkinkan pertukaran data yang lancar dan harmonis, seperti pertukaran data antara sistem akademik, keuangan, dan sumber daya manusia. Interoperabilitas juga mempermudah integrasi dengan platform eksternal seperti sistem evaluasi nasional atau regional.
- b. Kebijakan Keamanan: Sistem memiliki kebijakan keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif, termasuk pengendalian akses berbasis peran (role-based access control),

enkripsi data, dan audit log untuk melacak aktivitas pengguna. Dengan kebijakan keamanan yang tepat, SIM berbasis digital memastikan perlindungan data dan privasi pengguna.

- c. Kustomisasi: Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi atau lembaga pendidikan. Ini mencakup kemampuan untuk mengatur fitur, fungsi, dan antarmuka pengguna sesuai dengan kebutuhan pengguna dan preferensi organisasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.
- d. Scalability: SIM berbasis digital dapat dengan mudah berkembang atau ditingkatkan kapasitasnya seiring dengan pertumbuhan data dan jumlah pengguna. Kemampuan ini memungkinkan sistem untuk tetap efisien dan efektif meskipun organisasi berkembang.
- e. Keandalan dan Kestabilan: Sistem harus dapat diandalkan dan stabil untuk memastikan aksesibilitas dan ketersediaan informasi kapan saja dibutuhkan. Ini penting untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat.
- f. Integrasi Teknologi Modern: SIM berbasis digital menggunakan teknologi terbaru seperti komputasi awan, analisis data besar, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan fungsionalitas dan efisiensinya. Teknologi-teknologi ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
- g. User-Friendly: Sistem ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan mudah dioperasikan oleh pengguna dengan latar belakang teknologi yang beragam. Desain yang intuitif meningkatkan produktivitas dan kenyamanan pengguna, serta meminimalkan kebutuhan pelatihan khusus.

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, SIM berbasis digital menjadi alat yang efektif untuk mengelola administrasi pendidikan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik di lingkungan pendidikan.

Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital Terhadap Efisiensi Administrasi Pendidikan

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi administrasi pendidikan. Dengan mengadopsi sistem ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas dalam mengelola berbagai aspek administrasi. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari penggunaan SIM berbasis digital terhadap efisiensi administrasi pendidikan:

- a. Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Data
SIM berbasis digital memungkinkan akses cepat dan mudah ke data dan informasi yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk administrator, guru, siswa, dan orang tua. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, proses administrasi dapat berjalan lebih efisien.
- b. Otomatisasi Proses Administrasi
Banyak tugas administrasi rutin yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi menggunakan SIM berbasis digital. Hal ini mengurangi beban kerja administrasi dan meningkatkan efisiensi waktu serta sumber daya.
- c. Peningkatan Akurasi dan Keandalan Data
Penggunaan sistem digital membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data. Data yang lebih akurat dan andal memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat.
- d. Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Baik
SIM berbasis digital dapat membantu lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien, termasuk alokasi anggaran, tenaga kerja, dan peralatan. Sistem ini

- memungkinkan pemantauan dan pelaporan yang lebih akurat, sehingga mendukung perencanaan dan pengendalian yang lebih baik.
- e. **Komunikasi dan Kolaborasi yang Lebih Baik**
SIM berbasis digital memungkinkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efisien antara berbagai pihak terkait, seperti guru, siswa, orang tua, dan administrator. Komunikasi yang lancar mempercepat penyelesaian tugas dan masalah.
 - f. **Pelacakan Kinerja dan Evaluasi**
Sistem ini memungkinkan pelacakan kinerja siswa, guru, dan institusi secara keseluruhan. Dengan informasi yang tersedia secara real-time, lembaga pendidikan dapat melakukan evaluasi yang lebih tepat waktu dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan.
 - g. **Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data**
Dengan akses ke data dan informasi yang akurat, pengambil keputusan di lembaga pendidikan dapat membuat keputusan berdasarkan data yang faktual. Ini membantu dalam perencanaan yang lebih baik dan pengelolaan risiko.
 - h. **Pengembangan Kurikulum dan Program yang Lebih Tepat**
SIM berbasis digital memungkinkan analisis data kinerja siswa dan evaluasi program pendidikan. Hal ini mendukung pengembangan kurikulum dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan.
- Secara keseluruhan, penggunaan SIM berbasis digital memberikan berbagai manfaat signifikan bagi efisiensi administrasi pendidikan. Lembaga pendidikan yang mengadopsi sistem ini dapat mencapai pengelolaan yang lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan SIM digital dalam administrasi Pendidikan

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) digital dalam pengelolaan administrasi pendidikan dipengaruhi oleh beragam faktor. Beberapa elemen yang berperan penting dalam penggunaan SIM digital dalam administrasi pendidikan:

- a. **Infrastruktur Teknologi**
Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang andal, dan sistem keamanan, merupakan faktor utama yang mempengaruhi penggunaan SIM digital.
- b. **Kesiapan dan Kemampuan Sumber Daya Manusia**
Kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia, termasuk administrator, guru, dan staf, dalam menggunakan SIM digital sangat penting. Pelatihan dan pengembangan keterampilan diperlukan agar semua pihak dapat menggunakan sistem dengan efektif.
- c. **Anggaran dan Investasi**
Investasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan memelihara SIM digital bisa menjadi faktor penentu. Ketersediaan anggaran dan dukungan keuangan yang memadai memengaruhi kemampuan lembaga pendidikan untuk menggunakan sistem ini.
- d. **Dukungan Manajemen**
Dukungan dan komitmen manajemen untuk mengadopsi SIM digital sangat penting. Manajemen yang memahami manfaat dan potensi SIM digital akan lebih cenderung mendorong penggunaannya.
- e. **Kebijakan dan Regulasi**
Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan dapat mempengaruhi adopsi SIM digital. Dukungan kebijakan yang positif akan mempermudah penerapan sistem.
- f. **Kebijakan Keamanan dan Privasi**

Faktor keamanan dan privasi data sangat penting dalam penggunaan SIM digital. Lembaga pendidikan harus memastikan bahwa sistem mereka aman dan mematuhi regulasi privasi data untuk melindungi informasi sensitif.

g. **Kultur Organisasi**

Kultur organisasi yang mendukung inovasi dan perubahan teknologi akan lebih terbuka terhadap penggunaan SIM digital. Kultur yang mendorong kolaborasi dan transparansi juga berperan dalam penerimaan sistem.

h. **Ketersediaan dan Kualitas Data**

Data yang tersedia untuk diolah dan kualitas data yang baik sangat penting untuk keberhasilan penggunaan SIM digital. Ketersediaan data yang relevan dan akurat akan meningkatkan efektivitas sistem.

i. **Kesesuaian Sistem dengan Kebutuhan Organisasi**

Kesesuaian SIM digital dengan kebutuhan spesifik lembaga pendidikan, termasuk fungsionalitas dan antarmuka pengguna, akan mempengaruhi penggunaan dan efektivitas sistem.

j. **Responsibilitas Pengguna**

Tingkat responsibilitas pengguna, termasuk kemauan untuk belajar dan beradaptasi dengan sistem baru, akan memengaruhi adopsi dan penggunaan SIM digital.

k. **Integrasi dengan Sistem Lain**

Kemampuan SIM digital untuk terintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem pembayaran, sistem akademik, dan sistem kepegawaian, akan meningkatkan efisiensi dan manfaat sistem.

l. **Evaluasi dan Umpan Balik**

Evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan SIM digital dan penerimaan umpan balik dari pengguna dapat membantu lembaga pendidikan menyesuaikan dan meningkatkan sistem mereka.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan penggunaan SIM digital dalam administrasi pendidikan untuk mencapai tujuan efisiensi dan kualitas pendidikan yang lebih baik.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis digital memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi administrasi pendidikan. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan memungkinkan otomatisasi tugas administratif, SIM berbasis digital meningkatkan akurasi data, keandalan, dan aksesibilitas yang lebih baik. Manfaat lain termasuk pengelolaan sumber daya yang lebih baik, komunikasi dan kolaborasi yang lebih efisien, serta pelacakan kinerja dan evaluasi yang lebih akurat. Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini mencakup pentingnya memastikan kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dan dukungan manajemen dalam mengadopsi SIM berbasis digital. Selain itu, kebijakan keamanan dan privasi, serta integrasi sistem dengan sistem lain yang relevan, juga harus diperhatikan untuk mengoptimalkan penggunaan SIM berbasis digital dalam administrasi pendidikan. Evaluasi berkelanjutan dan penerimaan umpan balik dari pengguna dapat membantu lembaga pendidikan menyesuaikan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Diharapkan lembaga pendidikan perlu terus meningkatkan infrastruktur teknologi untuk mendukung penggunaan SIM berbasis digital serta pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar sistem dapat digunakan secara efektif.

5. Daftar Pustaka

- Agarina, M., Sutedi., Karim., A. S. (2024). Sistem Manajemen Administrasi Digital Pada SMK di Provinsi Lampung. *Jurnal Teknik: Jurnal Ilmiah Bidang Rekayasa*, 18(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10630627>
- Agustini, A. A., & Tarigan, A. K. F. (2023). Pengembangan Human Capital di Dunia Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2). <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.209>
- Febrianti, I., Tuffahati, J., Rifai, A., Affandi, R. H., Pradita, S., Akmalia, R., & Siahaan, A. (2023). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Perencanaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Efisiensi Pendidikan. *Academy of Education Journal*, 14(2). <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1763>
- Hasanah. R., Islam. M., Rachman. P. ((2024). Peran Kepala Tatausaha Sebagai Administrator Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Layanan Administrasi di Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga Tiris. *Jurnal Kewarganegeraan*, 8(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6032>
- Hidayah, D. F. N., Risdayatye, D., Febrianti, F. A., & Titalia, Y. S. (2023). Pengempelementasian Sarana Prasarana di Sekolah sebagai Penunjang Keefektifan dalam Pembelajaran bagi Dunia Pendidikan Modern. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 2(2).
- Hutabarat, A. K., Nababan, L., Silalahi. D., Turnip. Helena. (2024). Administrasi Pendidikan. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(1). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Julisawati. E. A., Nurhayati. M., Mardiyanti. S. (2023). Rancangan Sistem Informasi Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas 4 PSKD. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi STI&K (SeNTIK)*, 7(1). <https://ejournal.jak-stik.ac.id/index.php/sentik/article/view/3425/685>
- Kurniandini. S., Arifah. Z., Zakariya. A. (2022). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Peningkatan Mutu Administrasi Pendidikan di Temanggung. *Al-fâhim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.131>
- Kurniati, E., Lestari, M., Aprilianti, L., & Febiyanti, A. (2021). Digitalisasi Sistem Informasi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Data. *Jurnal Ilmiah Pesona PAUD*, 8(2).
- Loryana, D., & Syahidul, M. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Sekolah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9(5).
- Nurhusain, Damopolii, M., & Hasan, M. (2023). Penerapan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pada Proses Pembelajaran Aplikasi Google Classroom. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/edu.v3i1.39091>
- Purwadi. (2023). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Digital*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)
- Putra, Y. M. (2019). *Tugas Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Sistem Informasi*. Makalah. Universitas Mercu Buana

Widiyana. Ende., Hidayat. A.S. (2023). Analisis Fungsi Administrasi Pendidik dan Tendik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SDIT Insan Cermat. *Expectation: Journal of Islamic of Education Management*, 1(2).

<https://journal.albadar.ac.id/index.php/JIEM/article/view/97>

State defence education among the younger generation

Inayah Junika Zahira^{a,1}, Mas Fierna Janvierna Lussie Putri^{b,2}

^{a,b} Department of Pancasila and Citizenship, Pamulang University, South Tangerang, Indonesia

¹ inayahjunika@gmail.com; ² dosen02649@unpam.ac.id;

ARTICLE INFO

Article History:
Accepted: 14 March 2024
Revised: April 19, 2024
Approved: 27 May 2024
Available Online: 17 June 2024

Keywords:

National Defense Education
Young Generation

ABSTRACT

National defense education equips us with the knowledge and skills needed to uphold our duties as citizens in defending our country from internal and external dangers. The research method used in this research is the literature method with data collected from books, journals and other reading materials. The aim of this research is to explain the importance of national defense education for the younger generation as agents of change. Apart from that, the importance of national defense education is also outlined in a number of articles and poems which provide encouragement to those who uphold the country, are ready to defend honor and dignity, and are able to raise national pride. State defense education is a solution for national unity and unity. By cultivating a mindset of love for the country of the younger generation. This can also prevent radicalism. Radicalism can destroy the integrity of the Republic of Indonesia.

© 2024, Inayah Junika Zahira, Mas Fierna Janvierna Lussie Putri

This is an open access article under CC BY-SA license



How to Cite: ZahiraI., & PutriM. F. (2024). State defence education among the younger generation. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(1), 30-36. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i1.2462>

1. Introduction

State defence is a form of citizens' love for Indonesia, as contained in the 1945 Constitution article 27 paragraph 3 states that “every citizen has the right and obligation to participate in the defence of the country”. All Indonesian people are seen in the struggle to defend the country. Not only the TNI (Indonesian National Army). State defence education at all levels needs to be studied in order to increase public understanding of the importance of protecting the country. Because state defence education is one of the important aspects in growing and improving the character of society, here state defence education seeks to increase public understanding of the importance of maintaining the sovereignty and integrity of the state, as we know that factors that threaten the integrity of the state are not only from external

factors such as attacks from other nations against Indonesia, but there are also many factors that divide the nation that occur due to conflicts between communities.

The young generation is the generation that is expected to continue the ideals of the Indonesian state. In the progress of the nation, the younger generation has an important role. Therefore, we often hear that the young generation is the agent of change for a nation. This means that it is the young generation that will determine the progress of a nation. In order to navigate the swift currents of globalisation, the youth must have a strong nationalist attitude. However, as we can see today, globalisation is undermining the nationalist spirit in the youth, threatening the existence of the nation. Today's youth tend to talk about foreign culture rather than Indonesian culture, which is very rich.

The ability of the younger generation to defend the nation must be nurtured if they are to succeed in the cruel globalisation. The young generation in Indonesia is becoming less nationalistic along with the advancement of science and technology, and one of the causes is the influx of foreign culture into the country, which is then assimilated by the community. Therefore, there are many deviations from Pancasila values and norms by the younger generation. Today's youth also tend to like to talk about foreign culture rather than their own culture, when viewed further, Indonesia actually has a lot of cultural wealth that is interesting to discuss.

2. Method

This research uses the literature study method or literary research related to the research problem. Written works, including research findings that have or have not been published, are one of the foundations of this research. Zed (Kamil et al, 2023: 928) defines literature study as a process that involves collecting information from library data, reading, documenting, and analysing and processing research materials. Therefore, the information collected for this research took the form of a literature review centred on the problem under study. The theoretical information for this research was collected from various sources, including books, journals, online and offline mass media, and other related sources.

3. Result and Discussion

State defence education equips us with the knowledge and skills needed to uphold civil duties and safeguard the country from external and internal dangers. With this, state defence education is very important for the younger generation who are the successors of the nation and as agents of change must be able to foster this sense and bring change towards a more peaceful Indonesia.

State Defence Education

Education is an activity that is carried out consciously as a form of effort in increasing knowledge and developing potential in an individual. In addition, the general understanding of education is 'instilling intellectual, moral and spiritual values to students in accordance with mental and physical development' (Prihatin, 2018). Therefore, the purpose of education is so that they are better prepared to face the next life in the future. According to Oemar Hamalik (2006), education is a process that seeks to shape the student's personality to help him adjust to his environment and develop new skills that will help him in social situations. Therefore, it can

be concluded that education is a learning process to instil general and special knowledge in the environment of students in order to develop their potential.

Education seeks to produce individuals of high calibre and moral character who can quickly and accurately adapt to various situations, have a broad perspective on the future, and achieve their goals. Because education inspires us to develop in all aspects of life (Kristiono & Wiratomo, 2017). To protect the country from every threat from both inside and outside, both military and non-military, it is important to instil state defence awareness in every citizen. Because they all have duties and responsibilities towards state defence. A good society is a society that has a love for its country and plays an active role in state defence efforts.

In essence, awareness of state defence means being ready to sacrifice and serve the country. There are a wide range of actions that fall under the category of state defence, from the most vital to the most drastic. They range from fostering positive relations with neighbouring countries to working together to combat real threats posed by armed enemies.

According to Purnomo Yusgiantoro (2010: 39), 'state defence is an attitude and behaviour of the people imbued with love for the Unitary State of the Republic of Indonesia'. It is based on Pancasila and the 1945 Constitution, to ensure the survival of the nation and state. State defence is a very important attitude possessed by all Indonesian people, the community plays an important role in state defence efforts, this state defence action does not always have to take up arms, for this reason the role of the community in state defence is divided into two, namely physical and non-physical. Physically, the community plays a role in facing aggression attacks with defence efforts from parties that threaten the Indonesian nation. One of them is by taking up arms in the event of an attack from another nation against the Indonesian nation. Meanwhile, non-physically, the community plays a role in maintaining state sovereignty by increasing awareness of nation and state and complying with the rule of law in Indonesia. State defence is a fortress to maintain the integrity of the country, by instilling the value of love for the country, awareness of the nation and state and other state defence values are expected to be a strong foundation to ward off various threats to the integrity of the country.

According to the Directorate General of Defence Potential of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia (in Putri et al., 2020) the elements of state defence have five points, including:

1. Love of the homeland. A sense of belonging, defending, and caring for every inch of Indonesian territory without utilising it for personal or group interests, as well as protecting oneself from actions that harm the country.
2. Awareness of nation and state. Realising one's status as a citizen will help to continuously improve it by dedicating all of one's potential for the progress of the nation and state.
3. Belief in Pancasila as the state ideology. Upholding and implementing Pancasila as a state ideology means fully accepting that Pancasila is the basis of the Indonesian state.
4. Willing to sacrifice for the nation. Ready to make concessions to prioritise the interests of the nation and state above the interests of self or group.
5. Initial ability to defend the country. Every citizen must make a concerted effort to achieve this by having sufficient basic skills to defend the country when necessary.

In order for people to be proud of their country and understand what nationalism is, state defence education is very important. This is the reason why the Ministry of Defence of

the Republic of Indonesia is implementing state defence education. Four pillars of learning are used to implement this education; civic education, TNI training, basic military training required, and specialised training for each vocation. These four criteria are in line with the values of a universal defence system (Kurniawan & Utanto, 2018).

State defence education is very necessary and at the same time important to be implemented by all members of the state community. Especially the younger generation who will lead the country with their thoughts in the future. Therefore, it is important to foster a sense of nationalism in the younger generation. The sense of nationalism can be fostered by learning civic education. Love for the homeland is the same as defending the homeland.

State defence education can also raise the awareness of the younger generation of the richness and diversity of cultures in Indonesia. With that, the younger generation has a sense of maintaining the integrity of the Republic of Indonesia. State defence education also not only covers aspects of national resilience, but is also broadly related to state development. State defence education is also intended to strengthen the unity and integrity of the younger generation.

The Role of Young Geners in State Defence

The younger generation is considered the country's 'golden generation' and is expected to be able to contribute to the nation and state. The younger generation has the responsibility to protect the nation. To preserve the life of a country, legislation, and high-ranking officials of the country have developed a concept called state defence. Discussing the individualism of the group, or every element of the nation. Generations are tasked with continuing the development and ideals of the nation. They are the ones who will determine the back and forth of a nation. The law on youth says that the age range categorised as youth is citizens aged 16 to 30 years.

So it can be concluded that the younger generation has a very important role in the sustainability of the country in the future, the fate of a nation is at stake in the hands of youth. If this young generation has a high spirit of nationalism and patriotism, it is possible that the Indonesian nation will become a developed nation in the future, on the other hand, if the youth are indifferent to the nation and their country, the country may reap obstacles.

If the younger generation is aware of the need for national defence, then they will take part in it. As the younger generation will carry forward the difficulties and values of the nation in the future, it is important to instil in them a sense of responsibility and commitment to preserve the homeland. The task of this generation is to maintain the unity of the nation and be able to overcome any problems that arise due to conflicts that can lead to division. State defence activities that can be carried out by the younger generation include;

1. Involvement in Youth Movements and Organisations

Youth can actively participate in youth organisations such as youth organisations, community movements or social movements that focus on promoting and protecting the sovereignty and interests of the nation.

2. Character and Ethics Building

This young generation must be instilled with moral values, integrity, togetherness and responsibility, the aim is to form a young generation that supports and can strengthen their role in safeguarding the interests and sovereignty of the country.

3. Increased Patriotism

With a good understanding of the importance of defending the country's sovereignty, they will be more concerned about the continuity and sustainability of the country.

4. Preservation of Culture and Local Values

Understanding the sustainability of local culture will strengthen the sense of nationality and love for the country, it also acts as a bridge in understanding and respecting the diversity and uniqueness that exists in Indonesia, so that this becomes a strength in efforts to dispel threats that can undermine state sovereignty.

The Importance of State Defence Education for the Young Generation

State defence education is important, this is because state defence education is fundamental especially since the country does not want to have threats that can destroy national unity and integrity. With the existence of state defence education in the younger generation, it can make the younger generation become individuals who love the country. State defence education must be learned by all young people, both in the educational and non-educational environment. For example, adding local content regarding state defence education. Examples of non-education itself can be done by the government in the form of counselling or events that have a state defence theme that can be accessed by the wider community.

Why do future generations need to be educated about state defence? Because they will grow into individuals who are aware of their responsibilities and rights as Indonesian citizens. In this case, the younger generation can lead the development of a just, compassionate and democratic society and state. However, achieving the nation's goals requires a protracted process, which is based on the awareness of each community of the importance of protecting and defending this nation. In reality, national interests are not given the same priority in society as personal and group interests.

In this case, the younger generation can lead the development of a just, compassionate and democratic society and state. However, achieving the nation's goals requires a protracted process, based on the awareness of every citizen of the importance of protecting and defending the nation. In reality, national interests are not given the same priority in society as personal and group interests. In this case, the younger generation must be more sensitive to the national cause, i.e. they must understand the importance of state defence and feel a sense of love for it. They also need to address every issue with a broader and more critical thought process.

4. Conclusion

State defence education among the younger generation should get more attention in the educational environment. Because if the younger generation has a sense of patriotism in defending their country, the country will experience threats that will be faced in the future. These threats are not only military threats but can be more complex than that. It can threaten the welfare of the country and can destroy the country. The future of this nation is in the hands of the younger generation both in the educational environment and the environment outside of education. State defence education is a solution to national unity. By fostering a

mindset of love for the homeland of the younger generation. It can also hold radicalism. Radicalism can destroy the integrity of the Republic of Indonesia

5. References

Hamalik, O. (2006). *Proses Belajar Mengajar*.

Kamil, S. I., Nugroho, A. B., & Tarina, D. D. Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Bela Negara Untuk Menumbuhkan Nasionalisme Mahasiswa Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 926–933.

Kristiono, N., & Wiratomo, G. H. (2017). *Pendidikan Generasi Muda dan Bela Negara*.

Kurniawan, D. M., & Utanto, Y. (2018). Kurikulum Bela Negara Sebuah Kebutuhan Kurikulum Saat Ini Dan Masa Depan. *DEFENDOENSIA*, 3(2), 1–12.

Prihatin, E. (2018). *Konsep Pendidikan*. Karsa Mandiri Persada.

Putri, H. R., Metiadini, A., Rahmat, H. K., & Uksan, A. (2020). Urgensi Pendidikan Bela Negara Guna Membangun Sikap Nasionalisme pada Generasi Millennial di Indonesia. *Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 3, 257–271.

Rumiati, M. N & Dewi, D. A (2021). *Urgensi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial*, 2(1). Edukasi Nasional

Yusgiantoro, P. (2010). *Ekonomi Pertahanan*. PT Gramedia.

Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk Mencegah Gelandangan dan Pengemis

Intan Nur Ainnisa¹, Syifa Siti Aulia²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

¹ intannurainnisa333@gmail.com; ² syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Maret 2024

Direvisi: 21 April 2024

Disetujui: 29 Mei 2024

Tersedia Daring: 22 Juni 2024

Kata Kunci:

Penyuluhan,

Gelandangan,

Pengemis,

Dinas Sosial DIY

ABSTRAK

Pemerintahan memiliki peran penting dalam melakukan upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis salah satunya di wilayah Yogyakarta melalui Dinas Sosial. Kajian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena terkait upaya preventif dinas sosial DIY untuk mencegah gelandangan dan pengemis melalui penyuluhan dan edukasi. Tujuan dalam artikel ini untuk memberikan gambaran aktifitas Dinas Sosial DIY dalam melaksanakan edukasi untuk mencegah gelandangan dan pengemis dengan mengkaji tiga hal yakni dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi sebagai bentuk upaya preventif. Dalam perencanaannya dinas sosial membuat sebuah perencanaan dengan cara mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu, menganalisis sasarannya, melakukan penyusunan materi, merencanakan untuk penjadwalan, mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dilaksanakan oleh dinas sosial DIY melalui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan melalui media kebudayaan. Dinas sosial DIY menghadapi beberapa hambatan keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia. Namun, dinas sosial DIY memiliki solusi untuk menghadapi hambatan tersebut dengan mengajak serta menggandeng lembaga-lembaga lain dan tokoh masyarakat untuk ikut membantu melakukan penyebaran penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

Counseling,

Homelessness

Beggars

DIY Social Service

The government has an important role in carrying out preventive efforts to prevent homelessness and beggars, one of which is in the Yogyakarta area through the Social Service. This study uses a phenomenological method with a qualitative approach to explore phenomena related to the preventive efforts of DIY social services to prevent homelessness and beggars through counseling and education. The aim of this article is to provide an overview of the activities of the DIY Social Service in implementing education to prevent homelessness and beggars by examining three things, namely planning, implementation and obstacles in implementing counseling and education as a form of preventive effort. In planning, the social service makes a plan by first identifying its objectives, analyzing its targets, preparing materials, planning scheduling, preparing presenters to deliver outreach and public education. Counseling and education to the community is carried out by the DIY social service through various media such as print media, electronic media, and through cultural media. DIY social services face several obstacles, budget constraints and lack of human resources. However, the DIY social service has a solution to face these obstacles by inviting and collaborating with other institutions and community leaders to help spread outreach and education to the community.



How to Cite: Ainnisal., & AuliaS. (2024). Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk Mencegah Gelandangan dan Pengemis. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(1), 37-44. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i1.2468>

1. Pendahuluan

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang berisi tentang pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia wajib untuk memberikan atau perlindungan terkhusus kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Ada beberapa dari mereka (masyarakat Indonesia) yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, maka mereka memilih untuk berpindah-pindah tempat dan tidur dimana saja demi kelangsungan hidup.

Gelandangan dan pengemis adalah masalah sosial yang selalu ada dikota-kota besar khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta dengan perantara dinas sosial Kota Yogyakarta melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis yang ditetapkan pada peraturan daerah DIY nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Namun faktanya didalam kehidupan realita terdapat banyak gelandangan dan pengemis yang terlihat dimana-mana (Rumapea, 2020). Gelandangan yaitu mengacu pada orang-orang yang memiliki kondisi hidup yang bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang layak di lingkungan masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal serta hidup berkeliaran ditempat-tempat umum, sedangkan pengemis merupakan seseorang yang memperoleh penghasilan dengan cara mengemis ditempat-tempat umum dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain (Marpaung dkk., 2022).

Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 bahwa menjelaskan mengenai gelandangan dan pengemis merupakan kelompok rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan serta hidup tidak mampu serta tidak bermartabat, maka penanganan terhadap gelandangan dan pengemis memerlukan penanganan yang efektif, terpadu, serta berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum serta dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum serta lebih memfokuskan pada harkat dan martabat manusia untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

Dengan kehadiran pengemis dan gelandangan di kota Yogyakarta sendiri menurut Dinas Sosial menyatakan bahwa hampir 70% mereka berada di DIY yang berasal dari luar Yogyakarta. Tentunya pemerintah DIY cukup kerepotan dalam melakukan penanganan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bappeda DIY, jumlah entitas masyarakat gepeng yang berada di Yogyakarta pada tahun 2016 berjumlah 321 jiwa, pada tahun 2017 mencapai 406 jiwa, kemudian pada tahun 2019 berjumlah 324 jiwa. Sedangkan angka penyebaran gepeng diambil berdasarkan data provinsi dari dinas sosial DIY dapat dipahami melalui tabel di bawah ini (Khairunnisa dkk., 2020). Dalam penulisan, peneliti ingin memahami bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial DIY. Kemudian apa saja yang menjadi hambatan kepada pemerintahan Dinas Sosial DIY dalam penyuluhan dan edukasi tersebut.

2. Metode

Penulisan didalam artikel ini, peneliti menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dalam artikel ini yaitu memahami makna kejadian serta berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki asumsi berbeda-beda dan mengetahui apa yang ada di situasi “fakta” atau penyebab”. Dalam sistem metode fenomenologi, agar menafsirkan dari sudut pandang yang “objek” dari pemikiran pribadi serta sudut pandang “subjek” dimana pengetahuan diperoleh dari sudut pandang sendiri. Adapun cara mengetahui fenomenologi berasal dari pengalaman hidup (*world of experience*) atau dengan objek *live world* dan secara pengalaman kehidupan yang dirasakan pribadi (Husserl, 1970). Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif lebih mudah digunakan pada saat dihadapkan pada banyak fakta dan pandangan tersebut dikemukakan oleh (Meolong, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial DIY. Cara pengumpulan data jenis kualitatif ini yaitu berupa gambar, dan fakta. Hasil penelitian dipaparkan berupa kutipan data, agar memberikan makna gambaran penyajian hasil laporan tersebut (Sugiyono, 2016). Teknik dalam pengumpulan mengolah hasil data berupa buku, artikel jurnal, serta hasil wawancara. Sehingga, agar mendapatkan data secara deskriptif melalui lisan ataupun tertulis.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama S P penyuluh sosial madya dinas sosial DIY. Kemudian penelusuran dari laman website Dinas Sosial DIY, dan observasi di kantor dinas sosial DIY yang terdapat di Jalan Janti, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diperoleh gambaran umum terkait penyuluhan dan edukasi Masyarakat sebagai Upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial DIY. Dinas sosial adalah instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan tugas pemerintahan dalam upaya kesejahteraan sosial. Tugas pokok dinas sosial yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta menunjang tugas dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pengembangan tenaga kerja sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang memiliki keahlian khusus serta mempunyai jiwa pelayanan dibidang kesejahteraan sosial (M. Ramadhani, Sarbaini, 2016).

Penyuluhan sosial adalah salah satu proses untuk perubahan perilaku seseorang dengan melalui menyebarkan informasi, komunikasi, motivasi, serta memberikan edukasi secara baik oleh seorang penyuluh secara lisan maupun non-lisan kepada suatu kelompok untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan agar aktif berpartisipasi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dinas (Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020).

Tujuan penyuluhan sosial yaitu untuk melakukan publikasi serta mempromosikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian untuk menyebarluaskan suatu informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi secara langsung pada kelompok sasaran yang dituju. Sehingga meningkatkan pemahaman dan kemauan yang sama. Pengetahuan dan kemauan yang dimaksud agar menciptakan suatu partisipasi yang aktif untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi Masyarakat.

Penyuluhan dan edukasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari upaya preventif yang terdapat pada peraturan daerah no.1 tahun 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penanganan gelandangan dan pengemis. Tujuan penyuluhan dan edukasi masyarakat juga tentunya bertujuan untuk mengurangi adanya gelandangan dan pengemis yang ada diwilayah Yogyakarta. Karena perilaku gelandangan dan pengemis merupakan cerminan dari kurangnya kesejahteraan negara. Maka untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang terdapat di alinea ke-4 dan bertujuan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis agar

terselenggaranya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Maka pemerintah melakukan upaya dengan mengeluarkannya perda no.1 tahun 2014.

1. Penyuluhan merupakan penyebaran informasi yang dilakukan melalui komunikasi, informasi, motivasi, edukasi (KIME). Penyuluhan sosial adalah proses untuk mengubah perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi, edukasi kepada masyarakat, yang dilakukan oleh dinas sosial sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Maka dalam sebuah kegiatan perencanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat, dinas sosial merencanakannya dengan cara mengidentifikasi tujuannya, menganalisis sasarannya terlebih dahulu, melakukan penyusunan materi, pemilihan metode yang akan dipakai, mengatur penjadwalan, mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut setelah kegiatan penyuluhan dan edukasi masyarakat tersebut selesai.

Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan S P selaku penyuluh sosial madya di dinas sosial yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2024 :

“Gelandangan dan pengemis ditemukan cukup banyak di DIY, masyarakat Yogyakarta yang mempunyai hati permisif ini dapat dimanfaatkan pengemis dan gelandangan untuk mendapatkan uang, mereka bisa mendapatkan uang sehari bisa mencapai 100.000 bahkan lebih, sehingga perbuatan memberi uang itu harus dicegah. Dinas sosial tentunya harus memiliki suatu perencanaan bagaimana agar orang itu tidak menggelandang dan mengemis, bagaimana ketika ada gelandangan dan pengemis itu bisa diatasi dengan memberikan suatu penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan daerah DIY no.1 tahun 2014 tentang gelandangan dan pengemis agar masyarakat bisa mengetahui peraturan tersebut, maka tentunya dalam melakukan sebuah kegiatan penyuluhan dan edukasi, saya harus menentukan sebuah perencanaan untuk melaksanakan penyuluhan dan edukasi masyarakat dengan langkah yang pertama bagaimana mengidentifikasi tujuannya, menganalisis sasarannya terlebih dahulu, melakukan penyusunan materi, pemilihan metode yang akan dipakai, penjadwalan, mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut setelah kegiatan tersebut selesai bagaimana.”

2. Pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat merupakan salah satu pencegahan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial. Melalui penyuluhan sosial secara langsung masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung dan langsung dijawab oleh narasumber. Lokasi penyuluhan ini tentunya dilakukan di 7 lokasi yang berbeda dengan narasumber yang dihadirkan berasal dari DPRD DIY, Praktisi Sosial, Balai-balai atau UPT Dinas Sosial, dan juga penyuluh sosial Masyarakat juga ikut dilibatkan seperti bekerja sama dengan karang taruna setempat dan lain sebagainya.

Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan S P selaku penyuluh sosial madya di dinas sosial yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2024: “pelaksanaan dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi yang dilaksanakan oleh kami dinas sosial biasanya diadakan pada bulan february secara langsung. Untuk penyuluhan tidak langsung biasanya dilaksanakan sewaktu-waktu. Yang dimaksud penyuluhan tidak langsung yaitu penyuluhan yang dilaksanakan melalui media cetak seperti poster, baliho, dan lain-lain, kemudian dari segi elektronik seperti melalui media radio, talkshow, podcast, tayangan iklan televisi. Dan melalui sebuah media penyuluhan berbasis budaya yaitu melalui sebuah peragaan wayang cakruk”.

- a. Wayang Cakruk sebagai media berbasis budaya untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY ini bertujuan untuk melakukan Komunikasi, Informasi, Motivasi dan Edukasi (KIME) kepada individu, kelompok, dan lembaga. Sasaran yang dibidik dalam program ini adalah tokoh masyarakat mulai dari RT, /RW, lurah, tokoh agama dan lainnya. Pada dasarnya, pelayanan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan mengedukasi masyarakat. Wayang Cakruk memotretkan bagaimana kehidupan masyarakat yang sedang berkumpul di cakruk dengan beberapa masalah yang ada di masyarakat.

Wayang Cakruk dibawakan oleh Ki Sumarno Purbo Carito sebagai dalang wayang, acara pembuka dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu, RM. Sinarbiyatnujanat, SE., Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP., Mahruf Yusuf, S.Ag., Widiyanto, S.Sos., serta dihadiri oleh DPRD DIY, Praktisi dan Ustadz tiap agenda bulannya. Pertunjukan wayang dibuka dengan iringan gamelan dan nyanyian sinden sebagai tanda bahwa pertunjukan akan dimulai, dilanjut dengan pemaparan materi menggunakan media Wayang Cakruk oleh dalang yang berpengalaman, pementasan juga menghadirkan narasumber-narasumber sebagai pengisi materi Wayang Cakruk.

Penyuluhan Wayang Cakruk Tahun 2023 telah dilaksanakan di 28 titik se-DIY. Dinas Sosial DIY telah melaksanakan Penyuluhan Sosial Melalui Media Peraga melalui media Wayang Cakruk sebagai upaya preventif permasalahan sosial di 28 lokasi berdasar Kalurahan/ Kelurahan yang tersebar di 5 kabupaten/kota se-DIY pada 2023.

Kepala Dinas Sosial DIY “E P menyatakan bahwa pelaksanaan wayang cakruk merupakan inovasi Dinas Sosial dalam rangka melakukan penyuluhan sosial kepada masyarakat yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2015. Wayang Cakruk sendiri terinspirasi dari obrolan di pos ronda, dimana permasalahan sosial seringkali menjadi topik pembicaraan di pos ronda/cakruk, kemudian topik tersebut diobrolkan bersama-sama demi mencari solusi atau pemecahan masalah yang timbul di masyarakat”.

Wayang cakruk sendiri merupakan wayang yang dibuat oleh dalang “S” dengan menampilkan tokoh-tokoh yang berbentuk manusia yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh seperti RT, RW, Masyarakat biasa, pejabat, dan seterusnya.

- b. Baliho sebagai media cetak untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi kepada Masyarakat

Baliho merupakan salah satu bentuk media cetak yang dimana digunakan untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi secara luas. Baliho ini digunakan untuk penyuluhan dan edukasi karena ukurannya yang besar dan lokasi penempatannya strategis yang dimana banyak dilalui dan dilihat oleh banyak orang. Lokasi baliho ini tersebar diseluruh wilayah Yogyakarta diantaranya tersebar di kabupaten Sleman, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Bantul.

Baliho yang digunakan untuk penyuluhan dan edukasi oleh dinas sosial biasanya disebar di tempat umum, di jalan kota, disekitar rambu-rambu lalu lintas. Baliho-baliho tersebut tentunya berisikan peringatan atau himbuan untuk tidak mengemis dan menggelandang, serta imbauan untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, dan dibaliho tersebut berisikan Perda No.1 tahun 2014 juga, agar masyarakat bisa mentaati aturan tersebut.

Pesan atau kalimat yang digunakan dalam baliho tentunya harus berisikan pesan yang jelas dan informatif. Baliho harus menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan memotivasi masyarakat untuk bertindak sesuai yang diharapkan. Kalimat yang digunakan oleh dinas sosial untuk baliho seperti “silahkan bersedekah di lembaga sosial dan lembaga keagamaan agar tepat sasaran dan bermanfaat, jangan bersedekah di jalan atau tempat umum”, “menggelandang dan mengemis adalah cermin budaya malas, tidak sesuai budaya masyarakat DIY”, “dengan memberi uang kepada gelandangan dan

pengemis di jalanan berarti anda telah ikut memupuk perilaku menggelandang dan mengemis”, dan lain sebagainya.

3. Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial

Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan S P selaku penyuluh sosial madya di dinas sosial yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2024:

“Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat berasal dari faktor internal yaitu berupa hambatan dari keterbatasan anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat tentunya anggaran menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam melaksanakan penyuluhan dan edukasi masyarakat ini. Dinas sosial mempunyai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi masyarakat ini yaitu salah satunya anggaran yang terbatas hingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi ini terbatas hanya dibeberapa wilayah saja tidak menyeluruh”.

Dalam melaksanakan penyuluhan dan edukasi masyarakat dinas sosial juga memiliki hambatan karena kurangnya (SDM) Sumber Daya Manusia. Kekurangan sumber daya manusia disini yaitu dinas sosial kekurangan seorang penyuluh sosial yang profesional dalam melakukan penyuluhan yang dimana seorang penyuluh harus kompeten serta terlatih dibidang penyuluhan sosial. Tentunya dengan sumber daya manusia yang terbatas dalam penyuluhan dan edukasi ini, maka penyuluhan menjadi kurang optimal.

Untuk mengatasi atau meminimalisir hambatan diatas maka dinas sosial mengajak serta menggandeng lembaga-lembaga lain untuk ikut membantu melakukan penyebaran penyuluhan dan edukasi tersebut seperti satpol PP, kepolisian, kemudian penyuluh masyarakat yaitu orang-orang dari kalangan muda, karang taruna, tokoh-tokoh muda yang dilatih, untuk bisa ikut membantu menyampaikan pesan-pesan informasi kepada masyarakat, mereka merupakan relawan yang dimana bekerja atas dasar kesuka relawan. Sehingga dengan membangun jejaring tersebut bisa mengurangi anggaran tapi pesan-pesan penyuluhan dan edukasi tersebut bisa meluas tanpa mengeluarkan anggaran yang besar. Serta SDM yang kurang tersebut untuk menyebarkan penyuluhan dan edukasi masyarakat bisa tetap terlaksana dan meluas karena adanya bantuan dari lembaga, penyuluh sosial dari masyarakat serta sukarelawan yang dilatih sehingga menjadi penyuluh yang profesional.

4. Kesimpulan

Dalam sebuah perencanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat, dinas sosial membuat sebuah perencanaanya dengan cara mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu, dinas sosial menganalisis sasarannya, melakukan penyusunan materi, materi penyuluhan dan edukasi harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran. Kemudian pemilihan metode yang akan dipakai disesuaikan dengan kalangannya. Merencanakan untuk penjadwalan, Mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat, memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian evaluasi, evaluasi terkait peserta, pemateri, dan panitia. dan tindak lanjut setelah kegiatan penyuluhan dan edukasi masyarakat setelah selesai.

Melalui pelaksanaan penyuluhan sosial secara langsung, masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Pelaksanaan penyuluhan ini tentunya dilakukan di 7 lokasi yang berbeda dengan narasumber yang dihadirkan

berasal dari DPRD DIY, Praktisi Sosial, Balai-balai atau UPT Dinas Sosial, dan juga penyuluh sosial masyarakat juga ikut dilibatkan seperti bekerja sama dengan karang taruna setempat dan lain sebagainya. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui lisan atau langsung, dan melalui berbagai media-media lainnya seperti media online, media cetak, media elektronik, dan media kebudayaan. Peneliti memfokuskan pembahasan pada media cetak (Baliho) dan media kebudayaan (Wayang Cakruk). Penyuluhan melalui baliho dan wayang cakruk setelah dikaji, wayang cakruk merupakan penyuluhan yang sangat efektif dibandingkan dengan baliho. Namun semua itu memiliki kekurangan serta kelebihan.

Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat berasal dari faktor internal yaitu berupa hambatan dari keterbatasan anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat. Sumber daya manusia yang terbatas dalam penyuluhan dan edukasi ini menyebabkan penyuluhan menjadi kurang optimal. Namun dinas sosial memiliki solusi untuk menghadapi hambatan tersebut dengan mengajak serta menggandeng lembaga-lembaga lain untuk ikut membantu melakukan penyebaran penyuluhan dan edukasi tersebut.

5. Daftar Pustaka

- Baktiawan Nusanto. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs of Homeless and Beggar) in Jember District). *Jurnal Unmuh Jember*, 17(September).
- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020a). *Sejarah Dinas Sosial DIY*. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/sejarah-dinas-sosial/>
- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020b). *Struktur Organisasi Dinas Sosial DIY*. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/pejabat-struktural-2016/>
- Dinas Sosial Daerah Istimewa, & Yogyakarta. (2020). *Tugas dan Fungsi*. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/>
- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020c). *Visi Misi*. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/visi-misi/>.
- Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology (D. Carr, Trans.), 1–116. Retrieved from <http://www.joelgehman.com/page/28/>.
- Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). SMART URBAN SERVICE Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. *Journal Moderat*, 6(1).
- Kuntari, S., & Hikmawati, E. (2017). Melacak akar permasalahan gelandangan pengemis (gepeng). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosia*, 41(1)..
- M. Ramadhani, Sarbaini, H. M. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).
- Meolong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Marpaung, i R., Simanullang, E. T. K., Saragih, A. T., Sinaga, A. O. M., & Bara, S. B. (2022). Upaya Penanggulangan Gelandangan di kota Medan. *Abdi Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.24036/abdi-humaniora.v2i02.117424>
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. (2014). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis*.

- Perda Kota Yogyakarta No.1 tahun 2014. (2014). Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. *Peraturan Daerah (PERDA)*, 8(33), 44.
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna Jurnal ilmiah*, 23(2). <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.
- Rumapea, N. J. (2020). *Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudharma Putra, I. B. (2018). Sosial Control: Sifat dan Sanksi sebagai Sarana Kontrol Sosial. *Vyavahara Duta*, 13(1). <https://doi.org/10.25078/vd.v13i1.529>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

ISSN 2988-7968



9 772988 796008